



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP)

Kecamatan Sungai Tabuk
Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Laporan Kinerja Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2025 ini adalah merupakan dokumen pertanggungjawaban dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok dan fungsi.

Sebagai salah unsur dari fungsi pelayanan umum dengan tugas pokok pada pemerintahan umum, serta sebagai unsur Pemerintahan Kabupaten Banjar bersama SKPD Teknis untuk mewujudkan pencapaian target-target RPJMD 2021 - 2026, telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Kecamatan Sungai Tabuk sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja ini semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan.



Sungai Tabuk, 16 Februari 2026
Plt. Camat Sungai Tabuk,

Ranuwaty Rosayulinda, SP. MP
NIP. 19680701 199703 2 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKjIP Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar tahun 2025 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam Renstra Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar 2025 - 2029 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan pada tahun 2025 telah berhasil dicapai.

Sasaran Strategis Kecamatan Sungai Tabuk adalah ***Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan*** dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan, ***Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan*** dengan Indikator Nilai Evaluasi Kecamatan, ***Meningkatnya***

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Pengukuran kinerja kecamatan terhadap tingkat kreativitas perangkat daerah kecamatan Sungai Tabuk dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya

Analisa terhadap sasaran strategis Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar tahun 2025 menunjukkan bahwa capaian pada sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan masuk pada kategori **Sangat Baik/ sangat Tinggi** dengan capaian kinerja **93,97 atau (100,67%)**, pada sasaran strategis Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Kecamatan masuk pada kategori **Sangat Baik/ sangat Tinggi** dengan capaian kinerja **98,75 atau (106,18%)** dan sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah masuk pada kategori **Sangat Baik/ BB** dengan capaian kinerja **74,84 atau (101,14%)**

Tantangan keberhasilan perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Banjar yang baik, tepat sasaran dan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka dibutuhkan sumber daya manusia baik dalam kuantitas maupun kompetensi. Namun hingga saat ini, sumber daya manusia perencana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar masih belum bisa dikatakan ideal dalam hal kuantitas.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Kedepan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banjar, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Kabupaten Banjar. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas harus mampu

dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Banjar.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Anggaran (belanja langsung) yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Kecamatan Sungai Tabuk berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Banjar dan rincian anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Sungai Tabuk adalah seperti dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Sumber Dana	Besar Anggaran (Rp)	Persentase (%)
APBD	Rp. 5.256.985.833,-	100%

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
BELANJA DAERAH	5,256,985,833.00	4,864,629,536.00	92.54	5,637,912,949.00
BELANJA OPERASI	4,555,087,833.00	4,192,528,528.00	92.04	5,165,578,139.00
Belanja Pegawai	2,668,150,000.00	2,526,772,507.00	94.70	2,625,929,373.00
Belanja Barang dan Jasa	1,886,937,833.00	1,665,756,021.00	88.28	2,539,648,766.00
BELANJA MODAL	701,898,000.00	672,101,008.00	99.07	472,334,810.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	549,247,000.00	519,450,008.00	94.57	311,127,100.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	100.00	6,350,710.00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	152,651,000.00	152,651,000.00	100.00	154,857,000.00
SURPLUS / DEFISIT	-5,256,985,833.00	-4,864,629,536.00	0	-5,637,912,949.00
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	-5,256,985,833.00	-4,864,629,536.00	0	-5,637,912,949.00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aplikasi Langkar Tahun 2025

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Maksud dan Tujuan	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	2
C. Isu Strategis	7
D. Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
A. Tujuan Strategis	11
B. Indikator Kinerja Utama	11
C. Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Tujuan Strategis	26
B. Capaian Kinerja Organisasi	26
B. Realisasi Anggaran	77
BAB IV PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran-Saran	103
LAMPIRAN	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Profil Sumber Daya Manusia Tahun 2025
Tabel 1.2	Tabel Permasalahan pada Kecamatan Sungai Tabuk
Tabel 2.1	Tabel Target dan Capaian IPP
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2025
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2025
Tabel 3.1	Skala Nilai Perangkat Kinerja
Tabel 3.2	Realisasi Kinerja Tahun 2025
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi/ Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya
Tabel 3.4	Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Target Periode Akhir Renstra
Tabel 3.5	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel 3.6	Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja
Tabel 3.7	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran untuk Mewujudkan Sasaran Kinerja Organisasi

BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

A.1 Maksud Laporan

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Kecamatan Sungai Tabuk
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Kecamatan Sungai Tabuk
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

A.2 Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Kecamatan Sungai Tabuk kepada Bupati
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Kecamatan Sungai Tabuk
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Sungai Tabuk
4. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
5. Sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran pada tahun mendatang

B. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

B.1 TUGAS POKOK :

Kecamatan Sungai Tabuk merupakan unsur Penunjang Administrasi Pemerintahan yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

B.2 FUNGSI :

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas. Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, administrasi kependudukan dan pembinaan keagrariaan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat Kecamatan;
- g. Penyelenggaraan pembinaan perekonomian dan pembangunan;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan

B.3 DASAR HUKUM :

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang Urusan pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten Banjar berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri/ Permen KL terkait dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sungai Tabuk;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2025 Tanggal 1 Oktober

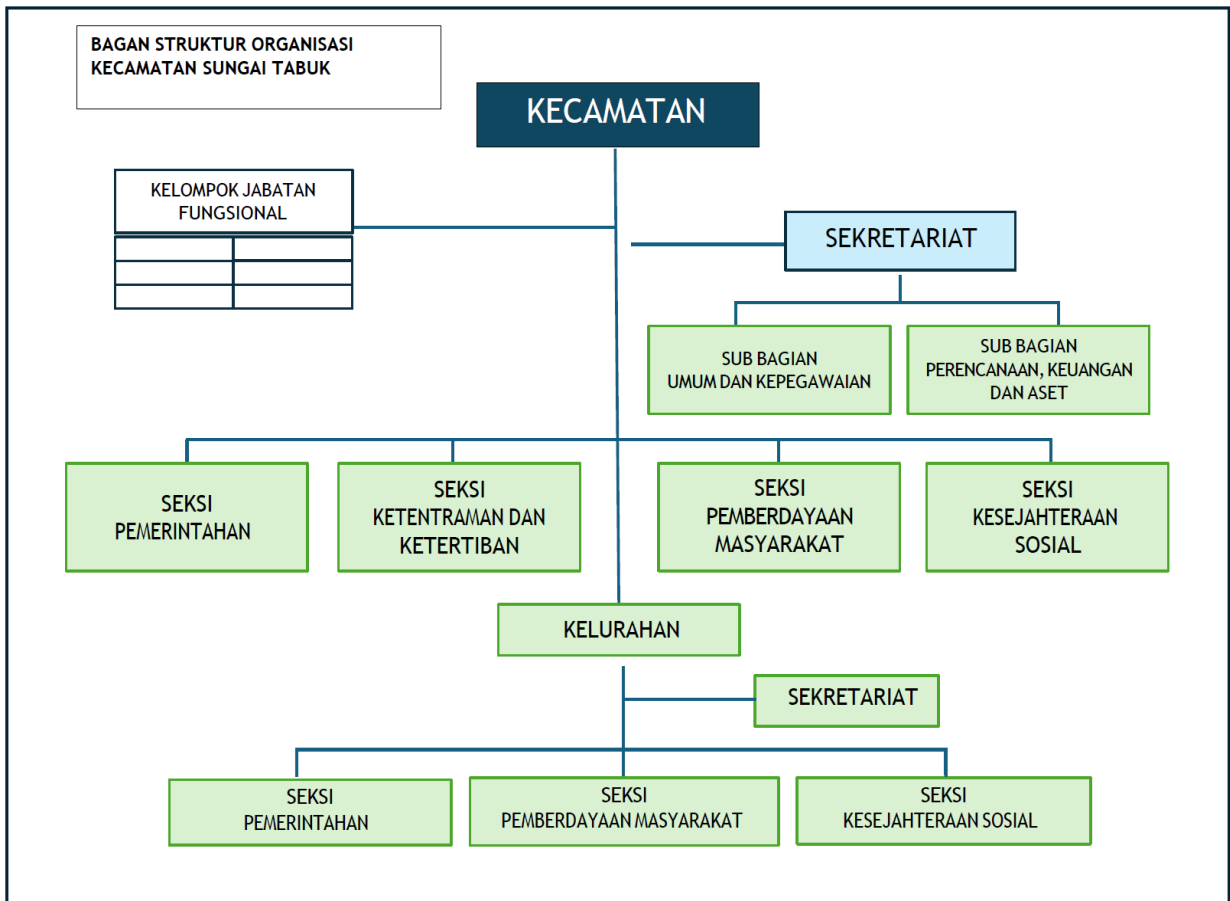
- 2025 Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 56);
 9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 42);
 10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 25);
 11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
 12. Peraturan Bupati Banjar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 61 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, tambahan lembaran daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
 14. Peraturan daerah kabupaten banjar nomor 5 tahun 2025 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025;
 15. Peraturan Bupati Banjar nomor 8 tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan bupati banjar nomor 46 tahun 2024 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025;
 16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2025 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
 17. Keputusan Camat Sungai Tabuk Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

B.4 STRUKTUR ORGANISASI :

Susunan Organisasi Kecamatan Sungai Tabuk terdiri dari:
Susunan organisasi Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar terdiri dari:

1. Camat.
2. Sekretaris Kecamatan, yang terdiri dari :
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub bagian Perencanaan Keuangan dan Aset
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dapat dilihat dalam Gambar berikut:



Gambar 1.1. Bagan SOTK Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar

B.5 KEPEGAWAIAN :

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia pada Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar masih belum memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dan pemberdayaan secara prosedural, tentunya untuk melaksanakan pelayanan dan pemberdayaan yang lebih berkualitas diharapkan dapat menyediakan aparat yang berkualitas.

Pada Tabel dibawah ini dapat dilihat Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Sungai Tabuk.

Tabel 1.1 Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Tahun 2025

No	Jabatan	Eselon				Golongan				Tingkat Pendidikan						Jml	
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD		
1	Camat			1		1				1							1
2	Sekretaris			1		1				1							1
3	Kepala Seksi Pemerintahan				1		1				1						1
4	Kepala Seksi Pemeberdayaan Masyarakat				1		1				1						1
5	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial				1		1				1						1
6	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban				1		1				1						1
7	Kasubag Renc & Keu				1		1					1					1
8	Kasubag Umpeg				1		1			1							1
9	Pelaksana							5					5				5
10	Fungsional																
11	Tenaga Honor/Kontrak										3		4			1	8
	Jumlah			2	6	2	6	5		3	8	1	9			1	21

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sungai Tabuk

C. ISU STRATEGIS

Kecamatan Sungai Tabuk secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Kecamatan Sungai Tabuk sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok Pelayanan, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan Pemerintahan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam Pemerintahan.

Sebelum menentukan isu dilakukan identifikasi permasalahan. Hasil identifikasi tersebut kemudian dilakukan analisa pohon masalah yang selanjutnya diltampilkan dalam bentuk matriks pemetaan masalah utama, masalah dan akar masalah sebagaimana tersebut di atas (Bab I.C). Isu srategis adalah permasalahan yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan (*Unresolved Matters*) yaitu permasalahan yang belum terselesaikan yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan penyelenggaraan dimasa akan datang.

Identifikasi isu-isu yang diperoleh dari proses sebelumnya tersebut ditapis dengan kriteria tertentu pada **Permendagri 86 Tahun 2017**, kesepakatan melalui FGD atau penilaian ahli atau kombinasi sehingga akan diperoleh isu strategis yang akan diselesaikan. Isu strategis pada dokumen perencanaan yang kemudian dimunculkan pada dokumen pelaporan kinerja. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Kecamatan Sungai Tabuk adalah Pelaksanaan Pelayanan Paten masih belum maksimal.

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Kecamatan Sungai Tabuk yang membantu Kepala Daerah dalam Urusan Pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Identifikasi permasalahan merujuk pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (Renstra 2025-2029 dan Renja) yaitu melalui proses analisis pohon masalah sehingga diperoleh mapping matriks masalah pokok, masalah dan akar masalah, dan hirarki permasalahan tersusun secara "cascading" (berjenjang) kemudian disajikan dalam bentuk diagram pohon masalah.

Kecamatan Sungai Tabuk masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Tabel Permasalahan pada Kecamatan Sungai Tabuk

ASPEK	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Transformasi Tata Kelola	Pelayanan publik belum optimal	Masih rendahnya Literasi Masyarakat terhadap pelayanan publik digital	Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman Masyarakat
			Keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah
			Belum optimalnya rentang kendali pelayanan publik
		Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Koordinasi dan sinergitas antar instansi masih kurang
			kurangnya partisipasi aktif masyarakat
			Ketergantungan pada bantuan & kurangnya kemandirian
			kurangnya efektifitas koordinasi dan fasilitasi
		belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah umum	Program sektoral tidak sepenuhnya melibatkan camat dalam perencanaan dan pelaksanaan.
			Program sektoral tidak sepenuhnya melibatkan camat dalam perencanaan dan pelaksanaan.
			Tata Kelola dan Koordinasi pemerintahan umum masih lemah

ASPEK	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			Kualitas SDM belum memadai
			Sarana dan Prasarana Pendukung Tidak Memadai
		Belum Optimalnya Fasilitasi penanganan gangguan trantibum	Kesadaran dan Disiplin Masyarakat masih kurang
			Keterlibatan masyarakat dalam menjaga trantibum masih kurang
			Dampak/pengaruh sosial ekonomi
			Koordinasi dan sinergitas antar instansi masih kurang
			Sarana prasarana pengawasan lingkungan (CCTV, pos ronda dll) masih minim
			Penegakan aturan belum konsisten
			Tata kelola administrasi Desa belum tertib
		Masih kurangnya pelatihan, bimbingan dan pendampingan	
		Sarana prasarana belum memadai	
		Pemanfaatan IT belum optimal	
		Sistem pengawasan dan evaluasi tatakeloa administrasi masih lemah	
		Sistem akuntabilitas kinerja belum terbangun sepenuhnya	Belum konsistennya Capaian akuntabilitas kinerja
			Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala
			Belum optimalnya ketersediaan data kinerja yang terkini dan terintegrasi

ASPEK	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			Belum optimalnya perencanaan dan pengukuran kinerja

Sumber : Dokumen Renstra Kec.Sungai Tabuk Tahun 2025-2029

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

KATA PENGANTAR;

DAFTAR ISI;

RINGKASAN EKSEKUTIF;

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen LKjIP, Tugas pokok dan fungsi (struktur organisasi), Permasalahan serta isu strategis organisasi;

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA

Menjelaskan tentang kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi tahun 2025 dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 beserta analisisnya

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dan Saran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan maupun subkegiatan Kecamatan. Adapun tujuannya yaitu: **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”**.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu : Indeks Pelayanan Publik (IPP) dengan target sebesar 4.54 Nilai dan realisasi Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4.66 Nilai dengan capaian 102.64 %. Definisi operasional sebagai berikut: Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada instansi pemerintah, yang dihitung berdasarkan pemenuhan komponen kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan, sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB. Formulasinya adalah Indeks Pelayanan Publik dihitung sebagai hasil penjumlahan nilai masing-masing komponen pelayanan publik yang telah dikalikan dengan bobotnya, meliputi kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan. Adapun target tujuan dan indikator tujuan tahun 2025 dapat di lihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Tahun 2025

No	Tujuan	Tujuan Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.54	Nilai	4.66	102.64 %

B. SASARAN PERANGKAT DAERAH

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan

kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Kecamatan Sungai Tabuk mengampu Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan. Berdasar urusan dan program yang diampu, Kecamatan Sungai Tabuk mendukung pencapaian misi keempat Kabupaten Banjar yang tercantum pada RPJMD yaitu :

“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Dan Birokrasi Yang Profesional, Bersih Dan Melayani”.

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diperoleh hasil pengukuran dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang meliputi 9 unsur yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - kesesuaian persyaratan, - Prosedur pelayanan, - Kecepatan pelayanan, - Kewajaran biaya, - Kompetensi petugas, - Prilaku petugas pelayanan, - Penanganan pengaduan, - Kualitas sarana dan prasarana. <p>Meningkatnya kualitas pelayanan publik berarti adanya perbaikan atau peningkatan dalam berbagai aspek yang memengaruhi pengalaman dan kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan</p>	$\frac{\sum \text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\sum \text{Total Unsur yang terisi}}$	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	<p>Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya. (Perbup Banjar Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan)</p> <p>Aspek yang dinilai meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aspek Administrasi, - Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, - Aspek Pelayanan Publik, - Aspek Kesejahteraan Sosial, - Aspek Ketentraman dan Ketertiban, - Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan - Aspek Pemberdayaan Masyarakat 	$\frac{\sum \text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\sum \text{Total Unsur yang terisi}}$	Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	<p>Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah skor atau nilai yang diberikan kepada instansi pemerintah berdasarkan tingkat pencapaian kualitas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, yang diukur berdasarkan hasil evaluasi penilaian terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai ini mencerminkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja serta penggunaan anggaran berbasis hasil.</p>	$\sum ((\text{Perencanaan Kinerja} \times 30\%) + (\text{Pengukuran Kinerja} \times 30\%) + (\text{Pelaporan Kinerja} \times 15\%) + (\text{Evaluasi Internal} \times 25\%))$ <p>Komponen penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan kinerja 30% 2) Pengukuran kinerja 20% 3) Pelaporan kinerja 15% 4) Evaluasi internal 25% <p>Dari masing-masing komponen penilaian terdapat sub-komponen dengan bobot penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sub-komponen keberadaan 20% 	LHE Perangkat Daerah

Sumber : Surat Keputusan IKU Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2025

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah (top-down) dan ke samping (horizontal-diagonal) dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Perencanaan kinerja Kecamatan Sungai Tabuk adalah rencana kinerja yang disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Tabel dibawah ini menyajikan sasaran strategis dan sasaran Kinerja Kecamatan Sungai Tabuk dengan program kegiatan serta alokasi anggaran yang dikelola Pemerintah Kecamatan Sungai Tabuk pada Tahun 2025.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$IKM = \frac{\sum \text{Total nilai persepsi per unsur}}{\sum \text{Unsur yang terisi}} \times 25$	93.34	Nilai			Camat
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	$\text{Nilai Evaluasi Kecamatan} = \left(\frac{\sum \text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\sum \text{Total Unsur yang terisi}} \right) \times 100\%$	93.00	Nilai			
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	$\sum ((\text{Perencanaan Kinerja} \times 30\%) + (\text{Pengukuran Kinerja} \times 30\%) + (\text{Pelaporan Kinerja} \times 15\%) + (\text{Evaluasi Internal} \times 25\%))$	74.00	Nilai			
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Tabuk	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern = \sum (Unsur kinerja utama x 40%) + (Unsur kepatuhan x 30%) + (Unsur Pelayanan Umum x 30 %)	80.00	Indeks	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3,799,096,333	Sekretaris Camat
5	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	$\frac{\text{Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai Ketentuan}}{\sum \text{Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun}} \times 100\%$	100	Persen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31,670,000	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Aset

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	$\frac{\sum \text{Dokumen keuangan dan aset yang disusun sesuai ketentuan}}{\sum \text{Dokumen keuangan dan aset yang disusun}} \times 100\%$	100	Persen	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,716,346,000	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Aset
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	$\frac{\sum \text{Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset BMD yang disusun sesuai ketentuan}}{\sum \text{Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset BMD yang disusun}} \times 100\%$	100	Persen	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9,750,000	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Aset
8	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	$\frac{\sum \text{Administrasi Kepegawaian yang sesuai dan tepat waktu}}{\sum \text{Administrasi Kepegawaian yang dibutuhkan}} \times 100\%$	100	Persen	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27,400,000	Kasubag Umum Kepegawaian
9	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	$\frac{\sum \text{Administrasi Umum yang terfasilitasi}}{\sum \text{Administrasi Umum yang dibutuhkan}} \times 100\%$	100	Persen	Administrasi Umum Perangkat Daerah	167,190,000	Kasubag Umum Kepegawaian

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	$\frac{\sum \text{Realisasi BMD}}{\sum \text{BMD yang direncanakan}} \times 100\%$	100	Persen	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	457,009,000	Kasubag Umum Kepegawaian
11	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	$\frac{\sum \text{Jasa Penunjang yang terpenuhi}}{\sum \text{Jasa penunjang yang harus dipenuhi}} \times 100\%$	100	Persen	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	248,389,203	Kasubag Umum Kepegawaian
12	Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	$\frac{\sum \text{BMD yang terpelihara}}{\sum \text{Pemeliharaan BMD yang direncanakan}} \times 100\%$	100	Persen	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141,342,130	Kasubag Umum Kepegawaian
13	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana	$\frac{\sum \text{Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan}}{\sum \text{Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang direncanakan}} \times 100\%$	100	Persen	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	51,010,000	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan.	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Kecamatan	<p><u>Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana =</u></p> $\frac{\text{Koordinasi dan Fasilitasi } \sum \text{Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan}}{\text{Koordinasi dan Fasilitasi } \sum \text{Penyelenggaraan Pelayanan yang direncanakan}} \times 100\%$	100	Persen	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	42,370,000	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
15	Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pelayanan Urusan Kesejahteraan Sosial yang Mudah diakses		1	Layanan			Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
16	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<p><u>Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat =</u></p> $\frac{\text{Urusan Pemerintahan yang } \sum \text{dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana}}{\sum \text{Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan}} \times 100\%$	100	Persen	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8,640,000	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	$\frac{\text{Koordinasi dan Fasilitasi } \Sigma \text{ Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan}}{\text{Koordinasi dan Fasilitasi } \Sigma \text{ Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan}} \times 100\%$	100	Persen	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1,094,783,000	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
18	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa masyarakat	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	$\frac{\text{Koordinasi dan Fasilitasi } \Sigma \text{ Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan}}{\text{Koordinasi dan Fasilitasi } \Sigma \text{ Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan}} \times 100\%$	100	Persen	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	124,680,000	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
19	Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	$\frac{\Sigma \text{ Ketertiban yang ditindaklanjuti}}{\Sigma \text{ Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang diterima}} \times 100\%$	100	Persen	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14,975,000	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
20	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	$\frac{\Sigma \text{ Koordinasi Trantibum yang dilaksanakan}}{\Sigma \text{ Koordinasi Trantibum yang direncanakan}} \times 100\%$	100	Persen	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9,315,000	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	$\frac{\text{Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan}}{\text{Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang direncanakan}} \times 100\%$	100	Persen	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5,660,000	Kepala Seksi Pemerintahan
22	Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	$\frac{\text{Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan}}{\text{Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan}} \times 100\%$	100	Persen	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	265,255,500	Kepala Seksi Pemerintahan
23	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	$\frac{\text{Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan yang dilaksanakan}}{\text{Urusan Pemerintahan Umum yang ditugaskan}} \times 100\%$	100	Persen	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	265,255,500	Kepala Seksi Pemerintahan

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti}}{\text{Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang diterima}} \times 100\%$	100	Persen	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Kepala Seksi Pemerintahan
25	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	$\frac{\text{Desa yang memiliki tata Kelola Administrasi yang baik}}{\text{Desa di wilayah Kecamatan}} \times 100\%$	100	Persen	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	31,866,000	Kepala Seksi Pemerintahan
26	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	$\frac{\text{Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan yang terlaksana}}{\text{Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan yang direncanakan}} \times 100\%$	100	Persen	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	31,866,000	Kepala Seksi Pemerintahan

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	$\frac{\text{Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan}}{\text{Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang direncanakan}} \times 100\%$	100	Persen	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	970,103,000	Lurah Sungai Lulut
28	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti}}{\text{Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang diterima}} \times 100\%$	100	Persen			Lurah Sungai Lulut
29	Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang Mudah diakses	Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang mudah diakses	1	Layanan			Lurah Sungai Lulut
30	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu}}{\text{Administrasi Kepegawaian yang dibutuhkan}} \times 100\%$	100	Persen	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	367,252,200	Sekretaris Lurah Sungai Lulut

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	$\frac{\sum \text{Dokumen keuangan dan aset yang disusun sesuai ketentuan}}{\sum \text{Dokumen keuangan dan aset yang disusun}} \times 100\%$	100	Persen			
32	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	$\frac{\sum \text{Jasa Penunjang yang terpenuhi}}{\sum \text{Jasa penunjang yang harus dipenuhi}} \times 100\%$	100	Persen			
33	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	$\frac{\sum \text{BMD yang terpelihara}}{\sum \text{Pemeliharaan BMD yang direncanakan}} \times 100\%$	100	Persen			
34	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Permasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum, Musyawarah perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2,955,800	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	Terbangunnya sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Pokmas/Ormas	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	223,335,000	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
36	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas/Ormas	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200,000,000	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
37	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas/Ormas	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	154,920,000	Kepala Seksi Pemerintahan
38	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas/Ormas	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	21,640,000	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Sungai Tabuk

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam bab II mengenai rencana kinerja tahun 2025.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup; kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus:

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100\%$$

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana})) \times 100\%$$

Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Kecamatan Sungai Tabuk Kab. Banjar tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada table berikut.

Tabel 3.2 Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	Hijau
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi	Hijau
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	Biru
4	51% ≤ 65%	Rendah	Kuning
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	Merah

A.1 MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI TUJUAN

Tujuan strategis terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat berupa data dan informasi tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan yang mengacu pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat.

Berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar, telah dilakukan telaah terhadap misi, tujuan, sasaran strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banjar.

Dari hasil telaah tersebut dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Sungai Tabuk mendukung sasaran dalam hal "Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik". Realisasi tujuan dan sasaran strategis tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Realisasi Tujuan Tahun 2025

No	Tujuan	Tujuan Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.54	Nilai	4.66	102.64%

Sumber data : RPJMD Kabupaten Banjar 2025 – 2029, Kecamatan Sungai Tabuk 2025

A.2 MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam tabel berikut :

Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.34	Nilai	93.97	100.67	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	93	Nilai	98.75	106.18	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74.00	Nilai	74.84	101.14	Tinggi
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Tabuk	80	Indeks	91.25	114.06	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
8	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
9	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
10	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
11	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
12	Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
14	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan.	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Kecamatan	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
15	Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pelayanan Urusan Kesejahteraan Sosial yang Mudah diakses	100	Persen	100.00	100.00	Sangat Tinggi
16	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
17	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
18	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa masyarakat	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
20	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
21	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
22	Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
23	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
25	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
26	Terseleenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
27	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
28	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
29	Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang Mudah diakses	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan Tepat Waktu	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
31	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
32	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
33	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
34	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Perasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum, Musyawarah perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
35	Terbangunnya sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Fokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
37	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Fokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
38	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Fokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi

Penjelasan Tabel 3.2 sebagai berikut :

1. Sasaran Kinerja Kecamatan Sungai Tabuk adalah *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan*, yang diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM merupakan instrumen evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah. Pengukuran ini dilakukan melalui survei kepada masyarakat sebagai pengguna layanan.

IKM disusun berdasarkan penilaian terhadap berbagai unsur pelayanan, meliputi persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, kompetensi dan perilaku petugas, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan. Hasil pengukuran tersebut diolah menjadi nilai indeks sebagai gambaran objektif kualitas pelayanan yang diberikan.

Pada tahun berjalan, Kecamatan Sungai Tabuk menetapkan target IKM sebesar **93,34**. Berdasarkan hasil survei dan pengolahan data, realisasi yang dicapai adalah sebesar **93,97**. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, maka tingkat capaian kinerja adalah:

$$\frac{93,97}{93,34} \times 100\% = 100,67\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan telah melampaui target dan berada dalam kategori **sangat baik**.

Pelaksanaan IKM bertujuan untuk:

1. Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
2. Menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kinerja unit pelayanan.
3. Menjadi dasar perbaikan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.
4. Mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Secara umum, hasil capaian ini menggambarkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan di Kecamatan Sungai Tabuk telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Ke depan, hasil ini diharapkan dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan melalui inovasi serta perbaikan berkelanjutan pada setiap unsur pelayanan.

2. Sasaran Kinerja Utama Kecamatan Sungai Tabuk adalah *Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan*, dengan indikator kinerja berupa Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK). Evaluasi Kinerja Kecamatan merupakan instrumen penilaian yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengukur tingkat kinerja kecamatan secara menyeluruh.

Kinerja Kecamatan mencerminkan tingkat efektivitas, kreativitas, dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan serta melaksanakan program pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Penilaian dilakukan berdasarkan unsur-unsur tertentu yang telah ditetapkan, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$(Total\ nilai\ per\ unsur \div total\ unsur\ yang\ terisi) \times nilai\ penimbang$$

Pada Tahun 2025, Kecamatan Sungai Tabuk menetapkan target Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan sebesar **93,00**. Berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten, realisasi yang diperoleh adalah sebesar **98,75**. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja adalah:

$$\frac{98,75}{93,00} \times 100\% = 106,18\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kecamatan Sungai Tabuk telah melampaui target yang ditetapkan, dengan predikat **Berhasil**.

Evaluasi Kinerja Kecamatan diselenggarakan oleh **Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten** sebagaimana diatur dalam *Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan*. Pelaksanaan evaluasi dilakukan satu kali dalam satu tahun, dimulai pada semester kedua tahun berjalan.

Adapun aspek yang menjadi fokus penilaian dalam Evaluasi Kinerja Kecamatan meliputi:

1. Aspek Administrasi
2. Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3. Aspek Pelayanan Publik
4. Aspek Kesejahteraan Sosial
5. Aspek Ketenteraman dan Ketertiban
6. Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan
7. Aspek Pemberdayaan Masyarakat

Secara umum, capaian ini menggambarkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sungai Tabuk telah berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberhasilan ini diharapkan dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan melalui penguatan inovasi, peningkatan kapasitas aparatur, dan optimalisasi pelaksanaan tugas serta fungsi kecamatan.

3. Sasaran Kinerja Kecamatan Sungai Tabuk adalah *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*, dengan indikator kinerja berupa Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Nilai SAKIP Perangkat Daerah merupakan hasil evaluasi atas tingkat akuntabilitas kinerja suatu Perangkat Daerah dalam merencanakan, mengukur, melaporkan, dan mengevaluasi kinerja, serta memanfaatkan hasil evaluasi tersebut untuk perbaikan kinerja dan pengambilan keputusan. Penilaian ini dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/Inspektorat atau Kementerian PANRB terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penilaian SAKIP didasarkan pada pemenuhan dan kualitas lima komponen utama, yaitu:

1. Perencanaan kinerja
2. Pengukuran kinerja
3. Pelaporan kinerja
4. Evaluasi internal
5. Capaian kinerja (outcome dan manfaat)

Tujuan penilaian SAKIP adalah untuk:

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- Mendorong budaya kerja yang berorientasi pada hasil (result-oriented).
- Memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Formulasi perhitungan nilai dilakukan berdasarkan akumulasi nilai setiap komponen yang telah ditetapkan dengan bobot (penimbang) masing-masing, yang secara umum dapat digambarkan sebagai:

$$(Total\ nilai\ per\ unsur \div total\ unsur\ yang\ terisi) \times nilai\ penimbang$$

Pada tahun berjalan, Kecamatan Sungai Tabuk menetapkan target Nilai SAKIP sebesar **74,00**. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi yang dicapai adalah sebesar **74,84**. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja adalah:

$$\frac{74,84}{74,00} \times 100\% = 101,14\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa target yang ditetapkan telah terlampaui, sehingga secara umum akuntabilitas kinerja Kecamatan Sungai Tabuk berada dalam kategori baik dan menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan kinerja yang terukur, transparan, dan berorientasi hasil.

Ke depan, hasil ini diharapkan dapat terus ditingkatkan melalui penguatan kualitas perencanaan berbasis kinerja, konsistensi pengukuran indikator, serta optimalisasi tindak lanjut hasil evaluasi internal.

4. Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Nilai Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) dengan Capaian Nilai 91.25. Indikator kinerja sasaran adalah Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI). Penilaian IKKI dilakukan oleh Inspektorat selaku APIP Daerah. Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja intern Perangkat Daerah tersebut meliputi unsur Kinerja Utama, Kepatuhan dan Kinerja Pelayanan Publik dengan formulasi perhitungan:

$$\sum (\text{Unsur kinerja utama} \times 40\%) + (\text{Unsur kepatuhan} \times 30\%) + (\text{Unsur Pelayanan Umum} \times 30\%)$$

$$\frac{91.25}{80.00} \times 100\% = 114,06\%$$

Unsur yang dinilai antara lain meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja, Unsur kepatuhan, tata laksana dan tata Kelola pengadaan barang dan jasa, SPIP, Keandalan Laporan Keuangan, Pengelolaan aset dan pengamanan aset serta manajemen ASN, Pelayanan Publik melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), adanya inovasi dan keterbukaan informasi dan layanan pengaduan.

Penilaian IKKI dilaksanakan pada Semester 2 di akhir tahun. Hasil Capaian IKKI Kecamatan Sungai Tabuk dari Target 80.00 nilai dengan capaian realisasi 91.25 nilai.

Kinerja Indikator IKKI ditunjang oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ini didukung oleh 8 (delapan) kegiatan yaitu 1) kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah; 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; 4) Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah; 5) kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah; 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah; 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah; dan 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Faktor yang menjadi pendorong capaian kinerja yaitu : Kerjasama internal dan unit kerja lainnya, teknologi yang semakin maju dan adanya target capaian yang harus dipenuhi Sedangkan kendala yang dihadapi adalah tidak adanya inovasi pada Kecamatan Sungai Tabuk dan kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten.

5. Sasaran Kinerja Meningkatnya Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas

Sasaran Kinerja Meningkatnya Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas dengan Indikator Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan, dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian Sangat Tinggi.

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang disusun meliputi: RKA, DPA, RKAP, DPPA, IKU, Rencana Aksi, Rencana Aksi Perubahan, Tabel Keselarasan, Renja, Renja Perubahan, PK, PK Perubahan

Sasaran kinerja tercapai 100 persen dengan formulasi perhitungan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang disusun dibagi Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi yang direncanakan di kali 100%

$$\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang disusun}}{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi direncanakan}} \times 100\%$$

$$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Yang menjadi faktor pendukung yaitu Tersedianya dokumen perencanaan sesuai jadwal, Koordinasi yang mudah dan nyaman dengan Mitra di Bappeda, BPKPAD, Bagian Organisasi, Inspektorat dan berusaha untuk menyelesaikan laporan sesuai permintaan/sesuai target. Adapun faktor penghambat yang menjadi kendala yaitu : Sinkronisasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan Program/ Kegiatan dalam dokumen perencanaan masih belum sepenuhnya selaras, Terlalu

lemahnya informasi dari Bidang pelaksana kegiatan/ lambat apabila diminta data maupun informasi serta sumber daya perencana yang masih terbatas.

Keberhasilan sasaran Kinerja Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah didukung 2 sub kegiatan antara lain :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Penyusunan dokumen perencanaan dengan target 13 dokumen terealisasi sesuai target yaitu 13 dokumen perencanaan. Dokumen tersebut antara lain IKU, Rencana Aksi, Rencana Aksi Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, Renja, Renja Perubahan, dan Pohon Kinerja
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja dengan target 20 laporan terealisasi sesuai target yaitu 20 laporan meliputi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, Laporan E Sakip Simondalev secara triwulanan, Laporan Kinerja Triwulan dan LKjIP.

6. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas Sasaran Kinerja Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas dengan indikator Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan, dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian Sangat Tinggi.

Formulasi Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana}}{\text{Target Administrasi Keuangan Perangkat Daerah}} \times 100\%$$
$$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Kegiatan yang di laksanakan pada sasaran kinerja Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas antara lain :

- Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 21 orang/ bulan dan terealisasi sebanyak 243 orang selama 1 tahun
- Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan dengan target 12 dokumen terealisasi 12 dokumen
- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan target 1 laporan terealisasi 1 Laporan Keuangan Akhir Tahun

Adapun yang menjadi faktor pendukung tercapainya yaitu adanya bimbingan dan koordinasi yang baik dengan BPKPAD. Sedangkan yang sering menjadi kendala adalah seringnya gangguan pada Aplikasi, antara Aplikasi SIPD RI dan SIPD Langkar terdapat selisih, Kurang kompetennya SDM yang ada di bagian keuangan Kecamatan Sungai Tabuk.

7. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah

Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah, dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian Sangat Tinggi.

Formulasi Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang direncanakan}} \times 100\%$$

$$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada sasaran kinerja Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas antara lain :

- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD terealisasi sebanyak 1 paket
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD terealisasi sebanyak 1 laporan

8. Sasaran Kinerja Lancarnya administrasi kepegawaian daerah

Sasaran Kinerja Lancarnya administrasi kepegawaian daerah dengan indikator Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu, dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian Sangat Tinggi.

Formulasi Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Administrasi Kepegawaian di Kecamatan yang terlaksana}}{\text{jumlah Administrasi Kepegawaian di Kecamatan yang direncanakan}} \times 100\%$$

$$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada sasaran kinerja Lancarnya administrasi kepegawaian daerah antara lain :

- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai terealisasi sebanyak 1 dokumen
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan terealisasi sebanyak 3 orang

9. Sasaran Kinerja Terselenggaranya kegiatan kantor

Sasaran Kinerja Terselenggaranya kegiatan kantor dengan indikator Persentase Terasilinasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran, dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian Sangat Tinggi.

Formulasi Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah di Kecamatan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah di Kecamatan yang direncanakan}} \times 100\%$$

$$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada sasaran kinerja Terselenggaranya kegiatan kantor antara lain :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sebanyak 4 (empat) paket. Adanya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ini mendukung pelayanan administrasi perkantoran. Dengan adanya komponen instalasi listrik yang lengkap, pelayanan perkantoran dapat berjalan dengan baik
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga berupa alat alat kebersihan dan sarana lainnya sebanyak 4 paket. Dengan tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga akan menunjang kelancaran

pekerjaan kantor.

- Penyediaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa alat tulis kantor sebanyak 4 paket. Dengan tersedianya bahan logistik akan menunjang kelancaran pekerjaan kantor.
- Penyediaan cetak dan penggandaan 1 paket sesuai target Penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah untuk memenuhi kebutuhan barang cetakan dan penggandaan sebagai penunjang kelancaran kegiatan administrasi perkantoran. Barang cetakan yang dihasilkan dari penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah Map kop Kecamatan, spanduk dan lain-lain
- Fasilitasi kunjungan tamu sebanyak 1 laporan sesuai target. Fasilitasi ini dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi atau menyambut tamu-tamu yang berkunjung ke Kecamatan Sungai Tabuk. Tamu-tamu yang berkunjung bukan hanya dari dinas atau instansi terkait tetapi ada beberapa kali kunjungan Universitas Sari Mulia dan kunjungan dari Kecamatan Banjarbaru Selatan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan sesuai target. Undangan yang harus dihadiri diantaranya Rapat Koordinasi undangan sosialisasi dan kegiatan rapat lainnya di Kabupaten ataupun Provinsi dan Luar Daerah.

Tercapainya keberhasilan dipengaruhi beberapa faktor pendukung yaitu: Koordinasi dan kerjasama internal dan eksternal yang baik dan beberapa faktor penghambat yaitu : Kurangnya SDM di Kecamatan Sungai Tabuk, Undangan rapat yang berbenturan dengan rapat lainnya, Jumlah kedatangan tamu yang tidak bisa di prediksi kedatangannya, harga standar satuan di DPA terlalu tinggi.

10. Sasaran Kinerja Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan Sasaran Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan dengan indikator Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan, dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian Sangat Tinggi.

Formulasi Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan daerah yang terlaksana}}{\text{Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan daerah yang direncanakan}} \times 100\%$$
$$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Aktifitas yang mensupport keberhasilan capaian sasaran yaitu pengadaan peralatan dan mesin sebanyak 13 unit untuk memenuhi tersedianya sarana prasarana sesuai kebutuhan

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan tersedianya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan adalah beberapa pengadaan di Kecamatan Sungai Tabuk sudah melalui proses e purchasing, Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah sarana dan prasarana yang terbatas.

11. Sasaran Kinerja Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sasaran Kinerja Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi, dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian Sangat Tinggi.

Formulasi Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia}}{\text{Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang direncanakan}} \times 100\%$$
$$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Aktifitas yang mensupport keberhasilan capaian sasaran yaitu Penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 12 laporan, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari target 12 laporan terlaksana seluruhnya serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dari target 12 laporan terlaksana seluruhnya

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor adalah Kerjasama internal dan eksternal yang baik dan Tersedianya anggaran yang mencukupi dalam penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat yaitu kurangnya SDM Kecamatan Sungai Tabuk

12. Sasaran Kinerja Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan

Sasaran Kinerja Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan dengan indikator Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara, dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian Sangat Tinggi.

Formulasi Perhitungan:

$$\frac{\text{jumlah pemeliharaan BMD penunjang urusan perangkat daerah yang terpelihara}}{\text{jumlah pemeliharaan BMD penunjang urusan perangkat daerah yang direncanakan}} \times 100\%$$
$$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Aktifitas yang mensupport keberhasilan capaian sasaran yaitu Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dalam rangka menunjang operasional kantor, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa pemeliharaan AC, komputer, printer sehingga perlatan dan mesin kantor dapat terpelihara dan berfungsi dengan baik guna menunjang aktifitas perkantoran, Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah tersedianya anggaran untuk jasa pemeliharaan/ pajak dan perizinan kendaraan, Pembayaran paja tepat waktu. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah minimnya dana pemeliharaan mobil dinas operasional karena membutuhkan banyak penggantian sparepart/ suku cadang.

13. Sasaran Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana dengan target 100%. Secara fisik sasaran sudah tercapai seluruhnya sesuai target yang ditetapkan. Sasaran tercapai 100 persen yang diperoleh dari formulasi perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang direncanakan}} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

14. Sasaran kinerja program didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan melalui sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan aktifitas sebagai berikut :

- Penyusunan Rencana Kerja SOP dan SKM atas pelayanan pada Seksi Kesejahteraan sosial
- Melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi data kemiskinan
- Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang sosial
- Inventarisasi dan pengolahan data keluarga fakir miskin, penyandang cacat, lanjut usia, anak terlantar, panti asuhan dan korban bencana
- Inventarisasi dan pengolahan data organisasi sosial kemasyarakatan organisasi karang taruna, keluarga pahlawan perintis kemerdekaan dan veteran
- Melaksanakan fasilitasi kelancaran pemberian/penyaluran dan bantuan sosial kepada fakir miskin, lanjut usia, disabilitas, panti asuhan dna korban bencana
- Melaksanakan pelayanan pelegalisasian salinan (copy) Surat Keterangan Nikah
- Pelaporan kejadian bencana alam

- Melaksanakan kegiatan Kecamatan Sehat
- Melaksanakan kegiatan rembuk stunting
- Rapat PKH

Adapun yang menjadi faktor pendukung pada sasaran Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yaitu : Koordinasi yang baik dengan Masyarakat, Pembakal dan Kelurahan serta internal Kecamatan dan Dinas SKPD terkait. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya yaitu : Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk hadir ke Posyandu serta rendahnya kesadaran Masyarakat tentang Bahaya Stunting pada anak.

15. Sasaran Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Kesejahteraan Sosial Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Kesejahteraan Sosial dengan indikator kinerja Jumlah Pelayanan Urusan Kesejahteraan Sosial yang Mudah diakses dengan target 100%. Secara fisik sasaran sudah tercapai seluruhnya sesuai target yang ditetapkan. Sasaran tercapai 100 persen yang diperoleh dari formulasi perhitungan yaitu Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan yang dilaksanakan di bagi dengan koordinasi penyelenggaraan pelayanan yang direncanakan di kali 100 %

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

16. Sasaran Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat

Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan indikator kinerja Jumlah Sub Keg Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang terlaksana dengan target 100%. Secara fisik sasaran sudah tercapai

seluruhnya sesuai target yang ditetapkan. Sasaran tercapai 100 persen yang diperoleh dari formulasi perhitungan yaitu Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang terlaksana

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang Ada di Kecamatan melalui sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan aktifitas sebagai berikut :

- Rapat Koordinasi TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan)
- Fasilitasi bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana

Yang menjadi faktor pendukung pada sasaran Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat antara lain Koordinasi yang baik antara Pemerintahan Desa/kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten, serta Dukungan dari Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan Kesejahteraan Sosial. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat yaitu : Rendahnya Pemahaman masyarakat tentang masalah sosial, terutama kurangnya kesadaran masyarakat tentang kriteria penerima bantuan sosial, Belum pernah dilakukan studi banding ke daerah lain yang telah berhasil menyelenggarakan pelimpahan wewenang

17. Sasaran Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

Sasaran Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana dengan target kinerja 100%. Secara fisik sasaran kinerja sudah tercapai seluruhnya sesuai target yang ditetapkan sesuai dengan Definisi Operasional yaitu Menunjukkan jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang di laksanakan (Keg PKK,

Musrenbang Kecamatan, dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Lainnya dengan formulasi perhitungan :

$$\frac{\text{Koordinasi Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang di laksanakan}}{\text{Koordinasi Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang di laksanakan direncanakan}} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa didukung dengan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

- *Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan target 21 lembaga kemasyarakatan. Target sub kegiatan sudah tercapai seluruhnya di Triwulan I Tahun 2025. Aktifitas yang sudah dilaksanakan yaitu kegiatan pra musrenbang dan Musrenbang tingkat kecamatan

- *Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan pelaksanaan Peningkatan Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan target 3 Laporan. Aktivitas yang dilaksanakan antara lain Monitoring dan pengawasan dana desa, pembinaan pengelolaan ADD, Evaluasi APDES, Kegiatan PKK dan Sosialisasi BUMDES.

Adapun yang menjadi faktor pendukung Koordinasi dan Kerja sama yang baik dengan Jajaran samping/Instansi terkait, Motivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat yaitu : Partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang masih kurang, Acara Kegiatan di Desa sering berbenturan jadwal dengan kegiatan yang ada diKecamatan, Kegiatan PKK menyita waktu PTT Kecamatan karena kurangnya kader di Kecamatan.

18. Sasaran Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Masyarakat
 Sasaran Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Masyarakat
 Indikator kinerja Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan target kinerja 100%. Secara fisik sasaran kinerja sudah tercapai seluruhnya sesuai target yang ditetapkan sesuai. dengan formulasi perhitungan :

$$\frac{\text{Koordinasi Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan}}{\text{Koordinasi Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan}} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

19. Sasaran Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 Indikator kinerja adalah Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti dengan target sebesar 100%.

Formulasi perhitungan :

$$\frac{\text{Gangguan Keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti}}{\text{Gangguan Keamanan dan ketertiban yang diterima}} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Pencapaian sasaran kinerja program didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan 2) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Adapun faktor penghambat pencapaian sasaran yaitu : Kurangnya Kerjasama intern, Kurang nya SDM serta Fasilitas tidak di dukung. Sedangkan untuk faktor pendukung diantaranya Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat

20. Sasaran Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator kinerja adalah Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan target sebesar 100%.

Formulasi perhitungan :

$$\frac{\text{Koordinasi Trantibum yang dilaksanakan}}{\text{Koordinasi Trantibum yang direncanakan}} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, disupport oleh 2 (dua) sub kegiatan

- *Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*

Sasaran sub kegiatan adalah Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan Indikator kinerja Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan. Aktivitas pada sub kegiatan ini yaitu berupa fasilitasi kegiatan Pilpres, Pileg dan Pilkada, Pengkoordinasian tahapan Pileg dan Pilpres, Pengamanan kotak suara pileg dan Pilpres sebelum dan setelah pemilu

- *Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*

Pelaksanaan sub kegiatan ini dilaksanakan di Triwulan III berupa Rapat Forum Komunikasi Umat Beragama di wilayah Kecamatan Sungai Tabuk yang bertujuan untuk memperkuat kerukunan umat beragama, Meningkatkan koordinasi internal organisasi FKUB, Mencegah konflik dan radikalisme beragama, dan Menjaga kerukunan antar umat beragama

21. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator kinerja adalah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan target sebesar 100%.

Formulasi perhitungan :

$$\frac{\text{Koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan}}{\text{Koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada yang direncanakan}} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan yaitu Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sasaran kinerja program didukung oleh Aktifitas yang dilaksanakan yaitu Pengumpulan data Satlinmas, Rapat Penegakan Perda dan Perkada.

Adapun yang menjadi faktor pendukung nya yaitu : Koordinasi yang baik antara Pemerintah Kecamatan, Satpol PP, BKAD, TNI/ Kepolisian, dan Pemerintah Desa, Dengan kombinasi faktor-faktor ini, pembinaan Satlinmas dapat terlaksana secara optimal untuk mendukung keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi Pilkada Kabupaten Banjar Tahun 2025, Partisipasi dan Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan peraturan akan dapat memperkuat efektivitas penegakan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat yaitu : Kurangnya tenaga pelatih profesional atau materi pelatihan yang relevan serta kurangnya sosialisasi tentang peraturan yang ada.

22. Sasaran Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Indikator kinerja sasaran adalah Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana. Kinerja sasaran tercapai seluruhnya dari target 100%, dengan formulasi perhitungan:

$$\frac{\text{Koordinasi dan fasilitasi Pemerintahan Umum yang dilaksanakan}}{\text{Koordinasi dan fasilitasi Pemerintahan Umum yang direncanakan}} \times 100\%$$
$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

23. Sasaran Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator kinerja sasaran adalah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Kinerja sasaran tercapai seluruhnya dari target 100%, dengan formulasi perhitungan:

$$\frac{\text{Usuran Pemerintahan Umum sesuai penugasan yang dilaksanakan}}{\text{Usuran Pemerintahan Umum yang ditugaskan}} \times 100\%$$
$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

- Sub kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Capaian kinerja sub kegiatan yaitu 200 orang. Aktifitas yang dilaksanakan berupa Apel Peringat HUT RI pada 17 Agustus 2025 yang dilaksanakan di Lapangan Pasir Putih Sungai Tabuk Keramat diikuti oleh seluruh aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Desa, dewan guru dan para pelajar, Ibu-ibu PKK dan Instansi vertikal lainnya di wilayah Kecamatan Sungai Tabuk.

- Sub kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Target kinerja sub kegiatan yaitu 3 dokumen. Tahapan aktifitas yang sudah dilaksanakan yaitu :

- Pelaksanaan kegiatan safari Ramadhan di Desa Lok Baintan
- Kegiatan MTQ yang pelaksanaannya di Kecamatan Astambul

- Kegiatan PHBI
- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Target kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yaitu 1 dokumen. Aktivitas yang telah dilaksanakan yaitu Rapat FORKOPIMCAM. Rakor Forkopimcam bertujuan untuk Meningkatkan sinergi antara lembaga pemerintahan dalam menyelesaikan masalah di tingkat kecamatan, memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan nasional, Menyelesaikan isu-isu strategis seperti keamanan, ketertiban, pelayanan publik, dan pembangunan daerah serta Mendorong pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan efektif melalui musyawarah bersama. Agenda Rakor membahas program kerja, evaluasi pelaksanaan kegiatan, penanganan isu strategis, serta pengambilan keputusan untuk solusi masalah yang muncul di Masyarakat.

Beberapa faktor pendukung dalam pencapaian sasaran yaitu :Koordinasi yang baik dengan Kapolsek, Danramil, Kepala Puskesmas, Kepala KUA dan pejabat lainnya. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat yaitu : Susahnya mencari jadwal pelaksanaan karena jadwal yang bentrok.

24. Sasaran Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti Indikator kinerja sasaran adalah Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti. Kinerja sasaran tercapai seluruhnya dari target 100%, dengan formulasi perhitungan:

$$\frac{\text{Pengaduan urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti}}{\text{Pengaduan urusan Pemerintahan Umum yang diterima}} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

25. Meningkatnya Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa Indikator kinerja sasaran adalah Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik. Sasaran tercapai 100,00 persen dengan formulasi perhitungan Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana dibagi Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang direncanakan dikali 100 persen. Dengan formulasi perhitungan :

$$\frac{\text{Desa yang memiliki tata Kelola administrasi yang baik}}{\text{Desa di wilayah Kecamatan}} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

26. Sasaran Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator kinerja sasaran adalah Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Sasaran tercapai 100,00 persen dengan formulasi perhitungan Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana dibagi Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang direncanakan dikali 100 persen. Dengan formulasi perhitungan :

$$\frac{\text{Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang terlaksana}}{\text{Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang direncanakan}} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Pencapaian sasaran kinerja program didukung oleh Program Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 4 (empat) sub kegiatan :

- Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Capaian kinerja sub kegiatan yaitu 1 dokumen. Tahapan aktifitas yang sudah dilaksanakan yaitu :
 - o Pengumpulan data/bahan dan persiapan data dukung pelaksanaan fasilitasi Administrasi tata pemerintahan desa
 - o Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tata Pemerintahan Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Capaian kinerja sub kegiatan yaitu 1 dokumen. Tahapan aktifitas yang sudah dilaksanakan yaitu :
 - o Pengumpulan data/bahan Pengelolaan Keuangan Desa
 - o Pelaksanaan Rapat Koordinasi
 - o Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Capaian kinerja sub kegiatan yaitu 1 dokumen. Tahapan aktifitas yang sudah dilaksanakan yaitu :
 - o Pengumpulan data/bahan dan persiapan data dukung pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - o Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - o Dokumentasi/pelaporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - o Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembakal Lurah

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Capaian kinerja sub kegiatan yaitu 1 dokumen. Tahapan aktifitas yang sudah dilaksanakan yaitu :

- Pengumpulan data/bahan dan persiapan data dukung pelaksanaan fasilitasi
- Rapat Koordinasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Adapun yang menjadi faktor pendukung yaitu : Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat, Koordinasi dan Kerja sama yang baik antara pemerintah desa, kecamatan, dan instansi terkait lainnya, Dukungan Kebijakan: Adanya regulasi dan kebijakan yang jelas dari pemerintah untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat yaitu : Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang kompeten, lemahnya teknologi dan informasi bagi desa di wilayah Kecamatan Sungai Tabuk.

27. Sasaran Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sasaran Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator kinerja Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan target kinerja 100%. Secara fisik sasaran kinerja sudah tercapai seluruhnya sesuai target yang ditetapkan sesuai dengan Definisi Operasional yaitu Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana

$$\frac{\text{Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan}}{\text{Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan yang direncanakan}} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

- Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Lulut
Aktivitas yang dilaksanakan antara lain : Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat (Sosialisasi Stunting), Pelatihan Kegiatan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Pelatihan Administrasi PKK, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lansia, Koordinasi RT, Musrenbang Kelurahan, Kegiatan Isra Mi'raj dan Jalan Pemukiman berupa Peningkatan Jalan Karya Tani RT.1 Kel. Sungai Lulut.

Beberapa faktor pendorong yang menjadi keberhasilan sasaran antara lain : Terjalannya koordinasi yang baik dengan Lembaga Kemitraan Kecamatan (PKK) dan Pambakal/Lurah, Tersedianya Anggaran yang Cukup dan mudahnya berkoordinasi ke Instansi terkait, Dukungan Partisipasi/peran serta masyarakat maupun lembaga kemasyarakatan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam pencapaian sasaran yaitu : Kurangnya Kapasitas SDM untuk Pelaporan semua Kegiatan, jumlah SDM hanya 7 orang di Kelurahan dan Anggaran yang terbatas dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan.

28. Sasaran Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti Indikator kinerja Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti dengan target kinerja 100%. Secara fisik sasaran kinerja sudah tercapai seluruhnya sesuai target yang ditetapkan sesuai dengan Definisi Operasional yaitu Pengaduan urusan pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti

$$\frac{\text{Pengaduan urusan pemberdayaan kelurahan yang ditindaklanjuti}}{\text{Pengaduan urusan pemberdayaan kelurahan yang diterima}} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

29. Sasaran Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan Indikator kinerja Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang Mudah diakses dengan target kinerja 100%. Secara fisik sasaran kinerja sudah tercapai seluruhnya sesuai target yang ditetapkan sesuai dengan Definisi Operasional yaitu Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang mudah diakses yaitu 1 layanan
30. Sasaran Kinerja Lancarnya administrasi kepegawaian daerah
Sasaran Kinerja Lancarnya administrasi kepegawaian daerah dengan indikator Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu, dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian Sangat Tinggi.

Formulasi Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Administrasi Kepegawaian di Kecamatan yang terlaksana}}{\text{jumlah Administrasi Kepegawaian di Kecamatan yang direncanakan}} \times 100\%$$

31. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas Sasaran Kinerja Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas dengan indikator Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan, dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian Sangat Tinggi.

Formulasi Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana}}{\text{Target Administrasi Keuangan Perangkat Daerah}} \times 100\%$$

32. Sasaran Kinerja Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan Sasaran Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan dengan indikator Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan, dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian Sangat Tinggi.

Formulasi Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan daerah yang terlaksana}}{\text{Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan daerah yang direncanakan}} \times 100\%$$

$$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

33. Sasaran Kinerja Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan Sasaran Kinerja Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan dengan indikator Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara, dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian Sangat Tinggi.

Formulasi Perhitungan:

$$\frac{\text{jumlah pemeliharaan BMD penunjang urusan perangkat daerah yang terpelihara}}{\text{jumlah pemeliharaan BMD penunjang urusan perangkat daerah yang direncanakan}} \times 100\%$$

$$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Aktifitas yang mensupport keberhasilan capaian sasaran yaitu Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dalam rangka menunjang operasional kantor, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa pemeliharaan AC, komputer, printer sehingga peralatan dan mesin kantor dapat terpelihara dan berfungsi dengan baik guna menunjang aktifitas perkantoran, Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

34. Sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Kelurahan

Sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator kinerja Jumlah Lembaga Permasalahatan yang berpartisipasi dalam Forum, Musyawarah perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan target kinerja 100%. Secara fisik sasaran kinerja sudah tercapai seluruhnya sesuai target yang ditetapkan sesuai dengan Definisi Operasional yaitu Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan adalah upaya-upaya pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat kelurahan dengan menyelaraskan berbagai program, kegiatan dan memberikan dukungan sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Pengukuran kinerja menunjukkan tingkat ketercapaian kegiatan koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kelurahan di wilayah Kecamatan dengan membandingkan antara jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan dengan jumlah kegiatan koordinasi yang direncanakan oleh unit kerja di tingkat Kecamatan atau Kelurahan dalam satu periode anggaran. berfokus pada upaya menyelaraskan, mengarahkan, dan menyatukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang melibatkan berbagai pihak, seperti Lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Tim Penggerak PKK, dan Perangkat Daerah terkait lainnya

Kegiatan koordinasi ini dengan formulasi perhitungan :

$$\frac{\text{Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang di laksanakan}}{\text{Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang di direncanakan}} \times \frac{100}{\%}$$

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

35. Sasaran Terbangunnya sarana dan Prasarana Kelurahan

Sasaran Terbangunnya sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun dengan target kinerja 100%. Secara fisik sasaran kinerja sudah tercapai seluruhnya sesuai target yang ditetapkan sesuai dengan Definisi Operasional yaitu Terbangunnya sarana dan prasarana kelurahan adalah kondisi dimana fasilitas fisik yang mendukung pelayanan publik, kegiatan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup warga telah tersedia, dibangun, atau diperbaiki sesuai kebutuhan, standar teknis, dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dengan formulasi perhitungan : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

36. Sasaran Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Sasaran Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator kinerja Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan target kinerja 100%. Secara fisik sasaran kinerja sudah tercapai seluruhnya sesuai target yang ditetapkan sesuai dengan Definisi Operasional yaitu Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan formulasi perhitungan : Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang mudah diakses

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

37. Sasaran Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Sasaran Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator kinerja Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan target kinerja 100%. Secara fisik sasaran kinerja sudah tercapai seluruhnya sesuai target yang ditetapkan sesuai dengan Definisi Operasional yaitu Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan formulasi perhitungan : Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang mudah diakses

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

38. Sasaran Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Sasaran Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator kinerja Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan target kinerja 100%. Secara fisik sasaran kinerja sudah tercapai seluruhnya sesuai target yang ditetapkan sesuai dengan Definisi Operasional yaitu Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan formulasi perhitungan : Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang mudah diakses

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

A.3 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan bagian dari kinerja strategis Kecamatan Sungai Tabuk sebagaimana yang tercantum pada Renstra Periode Tahun 2025-2029. Pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	93.97	100.67	92.84	121.43	89.25	94.98	
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	98.75	106.18	92.29	121.43	74.81	81.06	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74.84	101.14	71.16	96.16	69.8	87.84	
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Tabuk	Persen	91.25	114.06	79.46	104.55	81.24	109.78	
5	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	Persen	100	100	100	100	100	100	
6	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	Persen	100	100	100	100	100	100	

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	
9	Terseleenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	
10	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	Persen	100	100	100	100	100	100	
11	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persen	100	100	80.00	100	100	100	
12	Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Persen	100	100	100	100	100	100	

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana	Persen	100	100	98.00	100	100	100	
14	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan.	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	
15	Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pelayanan Urusan Kesejahteraan Sosial yang Mudah diakses	Persen	100	100	100	100	100	100	
16	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen	100	100	100	100	100	100	
17	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	Persen	100	100	100	100	100	100	
18	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa masyarakat	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	100	100	100	100	100	100	

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	
20	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100	100	100	100	
21	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
22	Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	Persen	100	100	100	100	100	100	
23	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
24	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	Persen	100	100	100	100	100	100	
26	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	100	100	100	100	100	
27	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
28	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	
29	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	Persen	100	100	100	100	100	100	
30	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	100	100	100	100	100	

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	
32	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	
33	Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang Mudah diakses	Persen	100	100	100	100	100	100	
34	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Perumahan yang berpartisipasi dalam Forum, Musyawarah perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	
35	Terbangunnya sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Persen	100	100	100	100	100	100	
36	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Fokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Fokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	
38	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Fokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Renstra Kecamatan Sungai Tabuk 2025-2029

Berdasarkan data pada tabel 3.3 di atas tentang Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026, tahun 2024 Kecamatan Sungai Tabuk menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan. Capaian indikator kinerja sasaran strategis Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan terealisasi pada tahun 2024 sebesar 92,29 Nilai dengan target sebesar 76 Nilai tersebut sudah melebihi target tahun 2024 yang sudah ditentukan dibandingkan dengan tahun 2023 capaian indikator kinerja sasaran strategis Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan terealisasi sebesar 74,81.

Sedangkan pada Renstra Tahun 2025-2029 Tahun 2025 Kecamatan Sungai tabuk menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu;

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Capaian indikator kinerja sasaran strategis terealisasi pada tahun 2025 sebesar 93.97 Nilai dengan target sebesar 93.34 Nilai.
- Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Kecamatan dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Capaian indikator kinerja sasaran strategis terealisasi pada tahun 2025 sebesar 74.84 Nilai dengan target sebesar 74.00 Nilai. Nilai dengan target sebesar 74.00 Nilai tersebut sudah melebihi target tahun 2025 yang sudah ditentukan dibandingkan dengan tahun 2024 capaian indikator kinerja SAKIP Kecamatan terealisasi sebesar 71.16 Nilai.

2. Capaian kinerja Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Tabuk realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 91,25 indeks dengan target 80.00 indeks. Nilai tersebut sudah melebihi target tahun 2025 yang sudah ditentukan. Sedangkan tahun 2024 nilai IKKI dengan capaian 79.46 indeks
3. Realisasi capaian kinerja pada Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dengan indikator kinerja Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD tahun 2025 memperoleh capaian kinerja 100% sama halnya dengan tahun 2024 juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%.
4. Realisasi capaian kinerja Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas dengan indikator kinerja Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 100% dibandingkan dengan tahun 2024 dengan capaian kinerja lebih tinggi sebesar 100%.
5. Realisasi capaian kinerja Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas dengan indikator kinerja Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang tersusun tahun 2025 memperoleh capaian kinerja 100% sama halnya dengan tahun 2024 juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%.
6. Realisasi capaian kinerja Terselenggaranya Kegiatan Kantor dengan indikator kinerja Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah tahun 2025 memperoleh capaian kinerja 100% sama halnya dengan tahun 2024 juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%.
7. Realisasi capaian kinerja Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan dengan indikator kinerja Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2025 memperoleh capaian kinerja

100% sama halnya dengan tahun 2024 juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%.

8. Realisasi capaian kinerja Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor dengan indikator kinerja Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan daerah tahun 2025 memperoleh capaian kinerja 100% sama halnya dengan tahun 2024 juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%.
9. Realisasi capaian kinerja Terpeliharanya Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan dengan indikator kinerja Persentase BMD yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan tahun 2025 memperoleh capaian kinerja 100% dibandingkan dengan tahun 2024 dengan capaian kinerja lebih tinggi sebesar 100%.
10. Realisasi capaian kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan dengan indikator kinerja Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan tahun 2025 memperoleh capaian kinerja 100% sama halnya dengan tahun 2024 juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%.
11. Realisasi capaian kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan tahun 2025 memperoleh capaian kinerja 100% dibandingkan dengan tahun 2024 dengan capaian kinerja lebih rendah sebesar 100%.
12. Realisasi capaian kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan sesuai dengan ketentuan (Kelurahan Sungai Lulut) dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan tahun 2025 memperoleh capaian kinerja 100% sama halnya

dengan tahun 2024 juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%.

13. Realisasi capaian kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan tahun 2025 memperoleh capaian kinerja 100% sama halnya dengan tahun 2024 juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%.
14. Realisasi capaian kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tahun 2025 memperoleh capaian kinerja 100% sama halnya dengan tahun 2024 juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%.
15. Realisasi capaian kinerja Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan dengan indikator kinerja Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa tahun 2025 memperoleh capaian kinerja 100% sama halnya dengan tahun 2024 juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%.

A.4 REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DAN TARGET KINERJA SASARAN TAHUN AKHIR PERIODE RENSTRA

Indikator kinerja sasaran Tahun 2025 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Periode Tahun 2025-2029. Pencapaian kinerja tahun 2025 Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Perubahan Renstra 2025, untuk mengetahui kemampuan Kecamatan Sungai Tabuk selama 1 (satu) tahun kedepan dalam

mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dan Target Periode Akhir adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Target Periode Akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Periode Akhir Renstra (2030)	PersentaseCapaian Periode Akhir Renstra (2030)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	93.97	93.84	100.14
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	98.75	93.50	105.61
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74.84	76.00	98.47
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Tabuk	Nilai	91.25	91.25	100.00
5	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	Persen	100	100	100
6	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	Persen	100	100	100
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100
8	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	Persen	100	100	100
9	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Adminsitrasi Umum Perkantoran	Persen	100	100	100
10	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	Persen	100	100	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Periode Akhir Renstra (2030)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2030)
1	2	3	4	5	6	7
11	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persen	100	100	100
12	Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Persen	100	100	100
13	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana	Persen	100	100	100
14	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan.	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Kecamatan	Persen	100	100	100
15	Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pelayanan Urusan Kesejahteraan Sosial yang Mudah diakses	Layanan	1	1	1
16	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen	100	100	100
17	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	Persen	100	100	100
18	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa masyarakat	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	100	100	100
19	Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100
20	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100
21	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	100	100	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Periode Akhir Renstra (2030)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2030)
1	2	3	4	5	6	7
22	Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	Persen	100	100	100
23	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100	100	100
24	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100
25	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	Persen	100	100	100
26	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	100	100
27	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	100	100	100
28	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100
29	Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang Mudah diakses	Layanan	1	1	1
30	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan Tepat Waktu	Persen	100	100	100
31	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	Persen	100	100	100
32	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	Layanan	1	1	1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Periode Akhir Renstra (2030)	PersentaseCapaian Periode Akhir Renstra (2030)
1	2	3	4	5	6	7
33	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Persen	100	100	100
34	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Permasalahan yang berpartisipasi dalam Forum, Musyawarah perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persen	100	100	100
35	Terbangunnya sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Persen	100	100	100
36	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Fokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persen	100	100	100
37	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Fokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persen	100	100	100
38	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Fokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persen	100	100	100

Sumber : Matrik Renstra Perubahan Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2025-2029

Berdasarkan data pada tabel 3.4 tentang Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Target Periode Akhir di atas menunjukkan bahwa :

- Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Sasaran Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan realisasi sebesar 93.97 Nilai sudah melebihi target tahun 2025 yakni 93.34 Nilai dan mendekati capaian target akhir periode renstra yakni 95.50 Nilai di tahun 2026. Capaian menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan baik dan melebihi target yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan.

- Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Kecamatan dan Sasaran Indikator Nilai Evaluasi Kecamatan dengan realisasi sebesar 98.75 Nilai sudah melebihi target tahun 2025 yakni 93.00 Nilai dan sudah melebihi target akhir periode renstra yakni 95.50 Nilai di tahun 2026. Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan telah dilaksanakan secara optimal.
- Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Sasaran Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan realisasi sebesar 74.84 Nilai sudah melebihi target tahun 2025 yakni 74.84 Nilai dan target akhir periode renstra yakni 76.00 Nilai di tahun 2026. Capaian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi nilai SAKIP dapat melebihi dari target tahun yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan.

A.5 REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2025 DAN TARGET NASIONAL

Merupakan capaian kinerja yang membandingkan dengan kinerja yang ditargetkan nasional, untuk mengukur keberhasilan daerah dengan standar Nasional. Tentang Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Tidak bisa di sandingkan dengan Target Provinsi Dan Nasional seperti tabel di atas mengingat belum diperolehnya data yang akurat dan kredible mengenai target Provinsi maupun Nasional tersebut.

Tabel 3.5 Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025 dan Target Nasional

No.	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Realisasi Tahun 2025	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	93.97	N/A	N/A
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	98.75	N/A	N/A
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74.84	N/A	N/A
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Tabuk	Nilai	91.25	N/A	N/A
5	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	Persen	100	N/A	N/A
6	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	Persen	100	N/A	N/A
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	Persen	100	N/A	N/A
8	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	Persen	100	N/A	N/A
9	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terselenggaranya Penyelenggaraan Penunjang Adminsitasi Umum Perkantoran	Persen	100	N/A	N/A
10	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	Persen	100	N/A	N/A
11	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persen	100	N/A	N/A
12	Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Persen	100	N/A	N/A

No.	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Realisasi Tahun 2025	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6	7
13	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana	Persen	100	N/A	N/A
14	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan.	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Kecamatan	Persen	100	N/A	N/A
15	Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pelayanan Urusan Kesejahteraan Sosial yang Mudah diakses	Layanan	1	N/A	N/A
16	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen	100	N/A	N/A
17	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	Persen	100	N/A	N/A
18	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa masyarakat	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	100	N/A	N/A
19	Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	Persen	100	N/A	N/A
20	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	N/A	N/A
21	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	100	N/A	N/A
22	Meningkatnya koordinasi dan Fasilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi dan fasilitas urusan pemerintahan umum yang terlaksana	Persen	100	N/A	N/A

No.	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Realisasi Tahun 2025	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6	7
23	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100	N/A	N/A
24	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	Persen	100	N/A	N/A
25	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	Persen	100	N/A	N/A
26	Terselenggaranya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	N/A	N/A
27	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	100	N/A	N/A
28	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	Persen	100	N/A	N/A
29	Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang Mudah diakses	Layanan	1	N/A	N/A
30	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan Tepat Waktu	Persen	100	N/A	N/A
31	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	Persen	100	N/A	N/A
32	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	Layanan	1	N/A	N/A
33	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Persen	100	N/A	N/A

No.	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Realisasi Tahun 2025	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6	7
34	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Permasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum, Musyawarah perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persen	100	N/A	N/A
35	Terbangunnya sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Persen	100	N/A	N/A
36	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persen	100	N/A	N/A
37	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persen	100	N/A	N/A
38	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persen	100	N/A	N/A

Sumber : Pengelohan Data Kecamatan Sungai Tabuk

A.6 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI

1. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2025 dengan capaian realisasi sebesar 93.97 Nilai dengan target 93.34 Nilai dengan capaian 100.67 %

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Kendala kuantitas dan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur berkaitan dengan jumlah dan tingkat keterampilan serta kompetensi dari pegawai atau aparatur yang ada di kecamatan Sungai Tabuk
- Fasilitas pelayanan belum memadai (ruang tunggu, akses difabel, IT)

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan:

- Terjalannya kerjasama, koordinasi serta sinergitas yang baik dengan pemerintah daerah dengan masyarakat dan stakeholder lainnya
- Monitoring dan evaluasi pelayanan secara berkala

Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:

- Melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja petugas layanan secara rutin
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan secara berkala

2. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan Indikator kinerja Nilai Evaluasi Kecamatan dengan capaian realisasi sebesar 98.75 Nilai dengan target 93.00 Nilai dengan capaian 106.18 %

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Kendala kuantitas dan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur berkaitan dengan jumlah dan tingkat keterampilan serta kompetensi dari pegawai atau aparatur yang ada di kecamatan Sungai Tabuk
- Keterbatasan anggaran untuk mendukung seluruh program dan kegiatan
- Keterbatasan fasilitas pendukung pelayanan (gedung, ruang layanan, peralatan)

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Terjalannya kerjasama, koordinasi serta sinergitas yang baik dengan pemerintah daerah dengan masyarakat dan stakeholder lainnya
- Komitmen bersama terhadap capaian kinerja kecamatan
- Adanya Dukungan dan partisipasi pemangku kepentingan

Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:

- Meningkatkan Nilai Evaluasi Kecamatan
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan secara berkala
- Optimalisasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan

3. Sasaran Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan capaian realisasi sebesar 74.84 Nilai dengan target 74.00 Nilai dengan capaian 101.14 %

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Pengumpulan data kinerja belum konsisten dan terdokumentasi
- Monitoring dan evaluasi kinerja belum dilakukan secara rutin
- Pemahaman aparatur terhadap konsep SAKIP belum merata

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Dukungan dan komitmen Camat terhadap penerapan SAKIP
- Keselarasan RPJMD, Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja
- Adanya Peran Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan

Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:

- Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP ditindaklanjuti
- Penyusunan LKjIP dilakukan lebih tepat waktu dan sesuai pedoman
- Koordinasi dengan Inspektorat dalam pembinaan SAKIP semakin ditingkatkan

4. Sasaran Strategis/ Sasaran kinerja Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Tabuk pada tahun 2025 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 91.25 Nilai dengan target 80.00 Nilai dengan capaian 113.41 %

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Beban kerja tidak seimbang dengan jumlah personel
- Monitoring kepatuhan dan kinerja belum dilakukan secara rutin

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Komitmen camat dan pimpinan seksi dalam penegakan kepatuhan
- Kerjasama internal dan unit kerja lainnya, teknologi yang semakin maju dan adanya target capaian yang harus dipenuhi
- Data dukung penilaian IKKI diperbaiki dan itu menjadi poin peningkatan nilai dari nilai penjaminan kualitas dari evaluator.

Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:

- Menyempurnakan kelengkapan administrasi kegiatan dan keuangan serta menata arsip dan bukti dukung kepatuhan secara terstruktur dan terdokumentasi
- Melaksanakan pembinaan disiplin dan peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan sesuai tugas dan fungsi masing-masing
- Koordinasi dengan Inspektorat dalam pembinaan semakin ditingkatkan

5. Sasaran kinerja Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas, dengan indikator kinerja Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan pada tahun 2025 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 % dengan target 100 % dengan capaian 100 %

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Data kinerja dan data pendukung belum sepenuhnya valid, mutakhir, dan terintegrasi
- Terlalu lemahnya informasi dari Bidang pelaksana kegiatan/ lambat apabila diminta data maupun informasi serta sumber daya perencana yang masih terbatas.

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Tersedianya dokumen perencanaan sesuai jadwal
- Koordinasi yang mudah dan nyaman dengan Mitra di Bappeda, BPKPAD, Bagian Organisasi, Inspektorat dan berusaha untuk menyelesaikan laporan sesuai permintaan/sesuai target
- Kerjasama internal dan unit kerja lainnya, teknologi yang semakin maju dan adanya target capaian yang harus dipenuhi

Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:

- Telah dilakukan penyelarasan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKPD) dengan indikator kinerja utama Melaksanakan pembinaan disiplin dan peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan sesuai tugas dan fungsi masing-masing
 - Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya
 - Koordinasi dengan Inspektorat dalam pembinaan semakin ditingkatkan
6. Sasaran Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas, dengan indikator kinerja Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan pada tahun 2025 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 % % dengan target 100 % dengan capaian 100 %

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Pemahaman aparatur pengelola keuangan belum merata, khususnya terkait regulasi penatausahaan keuangan daerah
- Sumber daya perencana dan keuangan yang masih terbatas
- Koordinasi antara PPK, PPTK, Bendahara, dan Perencanaan belum berjalan optimal
- Kelengkapan dan ketertiban dokumen penatausahaan belum sepenuhnya konsisten

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Bimbingan dan koordinasi yang baik dengan BPKPAD
- Ketersediaan regulasi dan pedoman teknis penatausahaan keuangan daerah

Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:

- Memperkuat koordinasi dan komunikasi antara PPK, PPTK, Bendahara, dan unit perencanaan
- Meningkatkan ketertiban administrasi dan dokumentasi penatausahaan keuangan sesuai regulasi
- Menindaklanjuti hasil pengawasan Inspektorat secara tepat waktu dan berkelanjutan

7. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah pada tahun 2025 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 % dengan target 100 % dengan capaian 100 %

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Masih banyak aset yang tercatat dan tidak diusulkan penghapusan
- di Kecamatan Sungai Tabuk tidak ada yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa
- Masih belum mengimplementasikan penggunaan e katalog sepenuhnya dan merealisasikan secara pengadaan langsung

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Bimbingan dari Bidang Ase tBPKPAD
- Kerjasama tim Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset yang solid

Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:

- Meningkatkan ketertiban administrasi pemeliharaan BMD sesuai ketentuan yang berlaku

8. Sasaran Lancarnya administrasi kepegawaian daerah dengan indikator Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu pada tahun 2025 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 % dengan target 100 % dengan capaian 100 %

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Terbatasnya sumber daya aparatur pemerintah kecamatan
- Kompetensi pengelola administrasi kepegawaian belum merata

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Bimbingan dan koordinasi yang baik dengan BKPSDM Kabupaten Banjar
- Adanya regulasi, juknis, dan pedoman kepegawaian yang jelas

Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:

- Koordinasi dengan BKD/BKPSDM terus ditingkatkan dalam pengelolaan administrasi kepegawaian
- Melakukan updating data pegawai secara rutin dan berkelanjutan melalui sistem informasi kepegawaian

9. Sasaran Terlaksananya Terselenggaranya kegiatan kantor dengan indikator Persentase Terasilitasnya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran pada tahun 2025 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 % dengan target 100 % dengan capaian 100 %

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Keterbatasan anggaran operasional untuk mendukung seluruh kegiatan kantor
- Sarana dan prasarana pendukung kegiatan kantor masih terbatas

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Tersedianya pedoman kerja, jadwal kegiatan, dan SOP administrasi
- Komitmen pimpinan dalam mendukung kelancaran operasional kantor

Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:

- Mengoptimalkan penggunaan anggaran operasional secara efektif dan efisien

10. Sasaran Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan dengan indikator Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan pada tahun 2025 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 % dengan target 100 % dengan capaian 100 %

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Keterbatasan anggaran yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan barang secara optimal
- Pemahaman SDM terkait regulasi pengadaan barang/jasa masih belum merata

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Tersedianya regulasi dan pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai acuan pelaksanaan
- Direalisasikan sesuai kebutuhan dan pendanaan yang tersedia

Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:

- Koordinasi antara unit pengusul, PPK, dan pengelola pengadaan telah ditingkatkan untuk mempercepat proses pengadaan

- Melakukan analisis kebutuhan barang milik daerah secara lebih akurat dan berbasis prioritas guna mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

11. Sasaran Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi pada tahun 2025 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 % dengan target 100 % dengan capaian 100 %

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Keterbatasan anggaran untuk memenuhi seluruh kebutuhan jasa penunjang secara optimal
- Di Kecamatan belum sepenuhnya menerapkan Aplikasi SRIKANDI

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Komitmen pimpinan perangkat daerah dalam mendukung kelancaran operasional kantor
- Dukungan sistem dan aplikasi pengadaan yang memudahkan proses administrasi

Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:

- Mengoptimalkan koordinasi antar unit kerja dalam perencanaan dan pelaksanaan jasa penunjang

12. Sasaran Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan dengan indikator Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara pada tahun 2025 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 % dengan target 100 % dengan capaian 100 %

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Alokasi anggaran pemeliharaan belum sepenuhnya memadai untuk mendukung kebutuhan pemeliharaan rutin dan berkala seluruh BMD
- Terbatasnya kompetensi dan jumlah SDM pengelola BMD

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Adanya peraturan dan SOP pengelolaan serta pemeliharaan BMD sebagai pedoman pelaksanaan
- Penggunaan aplikasi pengelolaan BMD untuk mendukung penatausahaan dan pengendalian asset

Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:

- Pemeliharaan rutin terhadap BMD penunjang pelayanan kantor telah dilaksanakan sesuai kemampuan anggaran
- Menyusun prioritas pemeliharaan BMD berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi pemanfaatannya

13. Sasaran Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan dengan indikator Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana pada tahun 2025 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 % dengan target 100 % dengan capaian 100 %

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Keterbatasan SDM kecamatan untuk mendukung tugas fasilitasi dan koordinasi lintas sektor

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Koordinasi yang baik dengan Masyarakat, Pembakal dan Kelurahan serta internal Kecamatan dan Dinas SKPD terkait

- Dukungan dan arahan pimpinan daerah dalam memperkuat peran koordinatif kecamatan

Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:

- Kecamatan Sungai Tabuk berperan aktif dalam monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di wilayah
- Meningkatkan intensitas dan kualitas koordinasi lintas sektor dengan OPD teknis terkait

14. Sasaran Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan indikator Jumlah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Kecamatan pada tahun 2025 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 % dengan target 100 % dengan capaian 100 %.

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Rendahnya Pemahaman masyarakat tentang masalah sosial, terutama kurangnya kesadaran masyarakat tentang kriteria penerima bantuan sosial

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Koordinasi yang baik antara Pemerintahan Desa/kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten, serta Dukungan dari Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan Kesejahteraan Sosial

Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:

- Kecamatan Sungai Tabuk berperan aktif dalam monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di wilayah

- Meningkatkan intensitas dan kualitas koordinasi lintas sektor dengan OPD teknis terkait

15. Sasaran Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Kesejahteraan Sosial dengan indikator Jumlah Pelayanan Urusan Kesejahteraan Sosial yang Mudah diakses pada tahun 2025 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 % dengan target 100 % dengan capaian 100 %.

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Rendahnya Pemahaman masyarakat tentang masalah sosial, terutama kurangnya kesadaran masyarakat tentang kriteria penerima bantuan sosial
- Keterbatasan SDM pada Kasi Kessos
- Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan (ruang layanan, peralatan, akses TIK)

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Koordinasi yang baik antara Pemerintahan Desa/kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten, serta Dukungan dari Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan Kesejahteraan Sosial
- Dukungan kebijakan dan program dari pemerintah daerah dan OPD teknis terkait

Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:

- Telah dilakukan peningkatan koordinasi dengan OPD teknis terkait urusan kesejahteraan sosial
- Peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat terkait prosedur pelayanan kesejahteraan sosial

16. Sasaran Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan indikator Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada tahun 2025 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 % dengan target 100 % dengan capaian 100 %.

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Keterbatasan SDM, baik dari segi jumlah maupun kompetensi teknis sesuai urusan yang dilimpahkan
- Dukungan anggaran yang belum sepenuhnya memadai untuk melaksanakan seluruh urusan secara optimal

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Koordinasi yang baik antara Pemerintahan Desa/kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten, serta Dukungan dari Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan Kesejahteraan Sosial
- Partisipasi masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan

Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:

- Koordinasi dengan OPD teknis dan pemerintah desa/kelurahan telah ditingkatkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan urusan
- Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dan sarana prasarana yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan urusan

17. Sasaran Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dengan indikator Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana pada tahun 2025 telah tercapai dengan capaian realisasi sebanyak 100 % dengan target 100 % dengan capaian 100 %.

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang masih kurang
- Acara Kegiatan di Desa sering berbenturan jadwal dengan kegiatan yang ada diKecamatan
- Kegiatan PKK menyita waktu PTT Kecamatan karena kurangnya kader di Kecamatan
- Jadwal kegiatan desa yang padat sehingga koordinasi tidak selalu tepat waktu

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah daerah terkait pemberdayaan masyarakat desa
- Koordinasi dan Kerja sama yang baik dengan Jajaran samping/Instansi terkait, Motivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab

Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:

- Meningkatkan intensitas koordinasi dan komunikasi antara kecamatan, OPD terkait, dan pemerintah desa
- Memperkuat pembinaan dan pendampingan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pemberdayaan
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa

18.Sasaran Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Masyarakat dengan indikator Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa pada tahun 2025 telah tercapai dengan capaian

realisasi sebanyak 100 % dengan target 100 % dengan capaian 100 %.

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Keterbatasan kapasitas SDM desa dalam perencanaan dan pelaporan kegiatan
- Jadwal kegiatan desa yang padat sehingga koordinasi tidak selalu tepat waktu

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Adanya komitmen pimpinan kecamatan dalam mendorong pemberdayaan desa
- Dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah daerah terkait pemberdayaan masyarakat desa
- Koordinasi dan Kerja sama yang baik dengan Jajaran samping/Instansi terkait, Motivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab

Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:

- Memperkuat pembinaan dan pendampingan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pemberdayaan
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa

19.Sasaran Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti pada tahun 2025 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 % dengan target 100 % dengan capaian 100 %.

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Keterbatasan SDM dan sarana prasarana pendukung dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- Pelaporan dan dokumentasi kegiatan koordinasi belum sepenuhnya tertib

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Komitmen pimpinan kecamatan dan kelurahan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum
- Partisipasi masyarakat dan tokoh lingkungan dalam menjaga ketertiban

Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:

- Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum

20. Sasaran Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2025 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 % dengan target 100 % dengan capaian 100 %.

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Keterbatasan SDM dan sarana prasarana pendukung dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- Pelaporan dan dokumentasi kegiatan koordinasi belum sepenuhnya tertib

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Komitmen pimpinan kecamatan dan kelurahan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum
- Dukungan Satpol PP, TNI/Polri, dan unsur terkait lainnya
- Partisipasi masyarakat dan tokoh lingkungan dalam menjaga ketertiban

Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:

- Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum

21. Sasaran Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan indikator Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada tahun 2025 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 % dengan target 100 % dengan capaian 100 %.

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Keterbatasan SDM dan sarana prasarana pendukung dalam penerapan dan penegakan Perda
- Pendokumentasian dan pelaporan kegiatan penegakan Perda belum sepenuhnya tertib

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Koordinasi yang baik antara Pemerintah Kecamatan, Satpol PP, BKAD, TNI/ Kepolisian, dan Pemerintah Desa, Dengan kombinasi faktor-faktor ini, pembinaan Satlinmas dapat terlaksana secara optimal untuk mendukung keamanan,

ketertiban, dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi Pilkada Kabupaten Banjar Tahun 2025

- Partisipasi dan Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan peraturan akan dapat memperkuat efektivitas penegakan

Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:

- Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penerapan dan penegakan Perda
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi kegiatan penegakan Perda
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penerapan Perda

22. Sasaran Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan indikator Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana pada tahun 2025 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 % dengan target 100 % dengan capaian 100 %.

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Keterbatasan SDM dan kompetensi teknis dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum
- Dukungan anggaran dan sarana prasarana belum sepenuhnya memadai

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Koordinasi yang baik dengan Kapolsek, Danramil, Kepala Puskesmas, Kepala KUA dan pejabat lainnya
- Komitmen pimpinan daerah dan camat dalam melaksanakan penugasan pemerintahan umum

Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:

- Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait pelaksanaan penugasan
- Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penugasan Kepala Daerah

23. Sasaran Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah pada tahun 2025 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 % dengan target 100 % dengan capaian 100 %.

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Keterbatasan SDM dan kompetensi teknis dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum
- Kelengkapan data dan bukti pendukung pengaduan dari masyarakat masih bervariasi
- Pemanfaatan sistem pengaduan berbasis teknologi belum maksimal

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Komitmen pimpinan daerah dan kecamatan dalam meningkatkan kualitas penanganan pengaduan
- Adanya regulasi dan kebijakan terkait pelayanan pengaduan masyarakat

Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:

- Memperkuat koordinasi lintas sektor untuk percepatan penyelesaian pengaduan

- Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian pengaduan

24. Sasaran Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti dengan indikator Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti pada tahun 2025 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 % dengan target 100 % dengan capaian 100 %.

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Keterbatasan SDM dan kompetensi teknis dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum
- Kelengkapan data dan bukti pendukung pengaduan dari masyarakat masih bervariasi
- Pemanfaatan sistem pengaduan berbasis teknologi belum maksimal

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Komitmen pimpinan daerah dan kecamatan dalam meningkatkan kualitas penanganan pengaduan
- Adanya regulasi dan kebijakan terkait pelayanan pengaduan masyarakat

Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:

- Memperkuat koordinasi lintas sektor untuk percepatan penyelesaian pengaduan
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian pengaduan

25. Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik pada tahun 2025 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 % dengan target 100 % dengan capaian 100 %.

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Keterbatasan SDM kecamatan, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi teknis pembinaan dan pengawasan desa
- Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana pendukung kegiatan pembinaan dan pengawasan

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Adanya pembinaan dan pengawasan terkait dengan pengelolaan dana desa yang ada oleh pemerintah
- Dukungan Partisipasi/peran serta masyarakat maupun lembaga kemasyarakatan
- Komitmen pimpinan daerah, camat, dan perangkat kecamatan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan desa

Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:

- Meningkatkan intensitas dan kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
- Memperkuat koordinasi lintas sektor dengan OPD teknis dan pendamping desa

26. Sasaran Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada tahun 2025 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 % dengan target 100 % dengan capaian 100 %.

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Keterbatasan SDM kecamatan, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi teknis pembinaan dan pengawasan desa
- Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana pendukung kegiatan pembinaan dan pengawasan

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Adanya Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rekomendasi pembinaan desa
- Adanya pembinaan dan pengawasan terkait dengan pengelolaan dana desa yang ada oleh pemerintah
- Dukungan Partisipasi/peran serta masyarakat maupun lembaga kemasyarakatan
- Komitmen pimpinan daerah, camat, dan perangkat kecamatan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan desa

Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:

- Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rekomendasi pembinaan desa
- Meningkatkan intensitas dan kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
- Memperkuat koordinasi lintas sektor dengan OPD teknis dan pendamping desa

27. Sasaran Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan indikator Presentase Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan pada tahun 2025 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 % dengan target 100 % dengan capaian 100 %.

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Kurangnya Kapasitas SDM untuk Pelaporan semua Kegiatan
- Jumlah SDM hanya 6 orang di Kelurahan dan Anggaran yang terbatas dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Terjalannya koordinasi yang baik dengan Lembaga Kemitraan Kecamatan (PKK) dan Pambakal/Lurah
- Tersedianya Anggaran yang Cukup dan mudahnya berkoordinasi ke Instansi terkait
- Dukungan Partisipasi/peran serta masyarakat maupun lembaga kemasyarakatan

Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:

- Peningkatan komunikasi dan koordinasi antara kecamatan dan kelurahan
- Pendampingan kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan

28. Sasaran Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti dengan indikator Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti pada tahun 2025 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 % dengan target 100 % dengan capaian 100 %.

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Kapasitas SDM untuk pengaduan terbatas
- Pemanfaatan sistem pengaduan berbasis teknologi belum maksimal

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk menyampaikan pengaduan secara resmi
- Adanya regulasi dan kebijakan terkait pelayanan pengaduan Masyarakat

Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:

- Peningkatan koordinasi dengan kelurahan dan perangkat daerah teknis dalam tindak lanjut pengaduan
- Pencatatan dan dokumentasi pengaduan mulai dilakukan lebih tertib

29. Sasaran Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan dengan indikator Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang Mudah diakses pada tahun 2025 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 % dengan target 100 % dengan capaian 100 %.

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Keterbatasan SDM dan anggaran dalam penyelenggaraan pelayanan urusan pemberdayaan kelurahan
- Pemanfaatan sistem pengaduan berbasis teknologi belum maksimal

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Partisipasi aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan
- Adanya regulasi dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan urusan pemberdayaan kelurahan

Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:

- Peningkatan koordinasi antara kecamatan, kelurahan, dan OPD teknis terkait
- Pelaksanaan sosialisasi layanan kepada masyarakat kelurahan

30. Sasaran Lancarnya administrasi kepegawaian daerah dengan indikator Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu pada tahun 2025 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 % dengan target 100 % dengan capaian 100 %

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Kurangnya sumber daya aparatur di Kelurahan
- Kompetensi pengelola administrasi kepegawaian belum merata

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Bimbingan dan koordinasi yang baik dengan BKPSDM Kabupaten Banjar
- Adanya regulasi, juknis, dan pedoman kepegawaian yang jelas

Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:

- Koordinasi dengan BKD/BKPSDM terus ditingkatkan dalam pengelolaan administrasi kepegawaian
- Melakukan updating data pegawai secara rutin dan berkelanjutan melalui sistem informasi kepegawaian

31. Sasaran Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas, dengan indikator kinerja Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan pada tahun 2025 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 % dengan target 100 % dengan capaian 100 %

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Kurangnya SDM di Kelurahan Sungai Lulut
- Pemahaman aparatur pengelola keuangan belum merata, khususnya terkait regulasi penatausahaan keuangan daerah
- Koordinasi antara PPK, PPTK, Bendahara, dan Perencanaan belum berjalan optimal
- Kelengkapan dan ketertiban dokumen penatausahaan belum sepenuhnya konsisten

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Bimbingan dan koordinasi yang baik dengan BPKPAD
- Ketersediaan regulasi dan pedoman teknis penatausahaan keuangan daerah

Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:

- Memperkuat koordinasi dan komunikasi antara PPK, PPTK, Bendahara, dan unit perencanaan di Kecamatan
- Meningkatkan ketertiban administrasi dan dokumentasi penatausahaan keuangan sesuai regulasi
- Menindaklanjuti hasil pengawasan Inspektorat secara tepat waktu dan berkelanjutan

32. Sasaran Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan dengan indikator Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan pada tahun 2025 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 % dengan target 100 % dengan capaian 100 %

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Keterbatasan anggaran yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan barang secara optimal

- Pemahaman SDM terkait regulasi pengadaan barang/jasa masih belum merata

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Tersedianya regulasi dan pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai acuan pelaksanaan
- Direalisasikan sesuai kebutuhan dan pendanaan yang tersedia

Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:

- Koordinasi antara unit pengusul, PPK, dan pengelola pengadaan telah ditingkatkan untuk mempercepat proses pengadaan
- Melakukan analisis kebutuhan barang milik daerah secara lebih akurat dan berbasis prioritas guna mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

33. Sasaran Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan dengan indikator Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara pada tahun 2025 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 % dengan target 100 % dengan capaian 100 %

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Alokasi anggaran pemeliharaan belum sepenuhnya memadai untuk mendukung kebutuhan pemeliharaan rutin dan berkala seluruh BMD
- Terbatasnya kompetensi dan jumlah SDM pengelola BMD

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Adanya peraturan dan SOP pengelolaan serta pemeliharaan BMD sebagai pedoman pelaksanaan
- Penggunaan aplikasi pengelolaan BMD untuk mendukung penatausahaan dan pengendalian asset

Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:

- Pemeliharaan rutin terhadap BMD penunjang pelayanan kantor telah dilaksanakan sesuai kemampuan anggaran
- Menyusun prioritas pemeliharaan BMD berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi pemanfaatannya

34. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan indikator Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Penghambat / kegagalan ;

- Tidak semua usulan dapat diakomodir sehingga dapat menurunkan antusiasme warga
- Usulan yang belum terealisasi dapat menimbulkan persepsi kurang efektifnya forum

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Lurah dan perangkat kelurahan mendorong dialog terbuka serta memberikan ruang penyampaian aspirasi
- Usulan masyarakat dibahas secara terbuka dan disampaikan kembali hasil prioritasnya.

Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:

- Memberikan pemahaman mengenai kewenangan, prioritas, dan mekanisme pengusulan
- Mengukur jumlah kehadiran dan kualitas usulan sebagai indikator peningkatan partisipasi

35. Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kasi Pemberdayaan Masyarakat)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kasi Pemberdayaan Masyarakat) dengan indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Penghambat / kegagalan ;

- Kondisi cuaca, lokasi, atau keterbatasan akses dapat menghambat pekerjaan
- Risiko kerusakan apabila tidak dirawat secara berkelanjutan

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan ;

- Pelaksanaan teknis didukung oleh instansi terkait sehingga sesuai spesifikasi
- Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan

Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:

- Melakukan pengecekan progres fisik serta kualitas pekerjaan
- Koordinasi dengan LPM

36. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kasi Pemberdayaan Masyarakat) dengan indikator Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Penghambat / kegagalan ;

- Kesibukan warga dalam bekerja membatasi waktu partisipasi
- Rendahnya keterampilan atau pemahaman dalam pengelolaan kegiatan.

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan ;

- Sinergi dengan RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat

Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:

- Memberikan pembinaan rutin kepada RT/RW, LPM, dan organisasi kemasyarakatan

37. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kasi Pemerintahan) dengan indikator Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Penghambat / kegagalan ;

- Kesibukan warga dalam bekerja membatasi waktu partisipasi
- Rendahnya keterampilan atau pemahaman dalam pengelolaan kegiatan.

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan ;

- Sinergi dengan RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat

Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:

- Memberikan pembinaan rutin kepada RT/RW, LPM, dan organisasi kemasyarakatan

38. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kasi Kesejahteraan Sosial) dengan indikator Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Penghambat / kegagalan ;

- Kesibukan warga dalam bekerja membatasi waktu partisipasi
- Rendahnya keterampilan atau pemahaman dalam pengelolaan kegiatan.

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan ;

- Sinergi dengan RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat

Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:

- Memberikan pembinaan rutin kepada RT/RW, LPM, dan organisasi kemasyarakatan

Alternatif Dan Solusi Yang Akan Dilaksanakan Untuk Mengatasi Permasalahan Tersebut Diatas .

1. Agar melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berjenjang dari level eselon III sampai dengan pelaksana/ staf dan di lengkapi dengan proses, analisis dan penjelasan secara singkat mengenai pencapaian kinerja yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja
2. Agar meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi bulanan/ triwulanan/ tahunan dengan melibatkan pimpinan, dan di ikuti oleh seluruh penanggung jawab kinerja, serta mengevaluasi, menganalisis, dan dapat memberikan dampak perbaikan dalam pencapaian kinerja pada bulan/ triwulanan/ tahunan berikutnya
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang kinerja ASN. Monitoring dan evaluasi bulanan juga diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan yang selama ini dilaksanakan di kecamatan agar sinkron antara perencanaan dan target serta ada kejelasan dalam capaian kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penambahan sumber daya manusia dan peningkatan wawasan

5. Memaksimalkan koordinasi pada intern Kecamatan Sungai Tabuk, sehingga Capaian Kinerja Sasaran Renstra, Program dan Kegiatan bisa dicapai dengan lebih baik lagi
6. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi

A.7 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk kegiatan yang pencapaian kinerjanya mencapai 100%. Dari 16 (Enam belas) sasaran strategis/program/kegiatan dengan indikator kinerja mayoritas menunjukkan pencapaian yang sama dengan 100% tetapi dengan realisasi anggaran kurang dari 100%,

Banyaknya kegiatan yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik, dan lebih jauh juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.6 Efisien Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	% Capaian Kinerja (≥100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100.67	92.54	8.13
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	106.18	92.54	13.64
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	101.14	92.54	8.60
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Tabuk	114.05	93.42	20.63

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	% Capaian Kinerja (≥100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
5	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	100	71.07	28.93
6	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100	94.65	5.35
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	100	94.36	5.64
8	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	100	96.79	3.21
9	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terasilinasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	100	97.66	2.34
10	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100	94.77	5.23
11	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100	77.49	22.51
12	Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100	92.72	7.28
13	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana	100	99.34	0.66
14	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan.	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Kecamatan			

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	% Capaian Kinerja (≥100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
15	Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pelayanan Urusan Kesejahteraan Sosial yang Mudah diakses			
16	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	18.75	81.25
17	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100	84.02	15.98
18	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa masyarakat	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
19	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100	89.24	10.76
20	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti			
21	Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang Mudah diakses			
22	Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100	89.37	10.63
23	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	86.85	13.15
24	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	93.52	6.48
25	Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	100	97.09	2.91

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	% Capaian Kinerja (≥100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
26	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
27	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti			
28	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	100	96.28	3.72
29	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			

Sumber : Pengelohan Data Kecamatan Sungai Tabuk

A.8 ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan serta pencapaian pernyataan kinerja adalah :

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan merupakan salah satu Sasaran Strategis Kecamatan Sungai Tabuk telah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan kinerja sasaran strategis ini ditunjang oleh beberapa program dan kegiatan, program yang mendukung pelaksanaan kegiatan diantaranya:
 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung sasaran kinerja ini antara lain:

- Memberi arahan terkait peningkatan pelayanan administrasi kecamatan
- Memberi arahan terkait Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP)
- Memberi arahan terkait Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
- Memberi arahan terkait Penanganan Pengaduan masyarakat
- Memberikan arahan untuk memanfaatkan Teknologi Informasi dalam Pelayanan
- Memberikan arahan terkait Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan

2. Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan Indikator Nilai Evaluasi Kecamatan, Program pendukung:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung sasaran kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan indikator Nilai Evaluasi Kecamatan sampai dengan triwulan IV tahun 2025, meliputi:

- Memberi arahan terkait pengumpulan dan pengecekan kembali terkait bahan dan data dukung seluruh aspek;
- Memberi arahan terkait koordinasi dengan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar;
- Memberi arahan terkait pelaksanaan rapat koordinasi internal pembagian tugas dalam rangka persiapan pelaksanaan evaluasi kinerja kecamatan.

3. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, Program yang mendukung sasaran kinerja ini adalah Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/Kota, kegiatan yang mendukung sasaran kinerja ini antara lain:
- Memberi arahan terkait Penyusunan dan Penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja
 - Memberi arahan terkait Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
 - Memberi arahan terkait Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Memberi arahan terkait Reviu dan Pengendalian Internal atas Kinerja
 - Memberi arahan terkait Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Implementasi SAKIP
 - Memberi arahan terkait Penyelarasan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja
 - Memberi arahan terkait Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP
4. Sasaran Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah sasaran ini merupakan sasaran kinerja Sekretaris Kecamatan yang juga telah berhasil melampaui target yang ditetapkan pada awal Tahun. Program yang menunjang kegiatan ini yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, adapun Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka mendukung keberhasilan kinerja sasaran ini antara lain:
1. Kepatuhan
 - a. proses bisnis dan tata laksana;
 - b. tata kelola pengadaan barang dan jasa;
 - c. implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - d. keandalan laporan keuangan;
 - e. pengelolaan dan pengamanan aset;
 - f. efektivitas pengendalian korupsi; dan
 - g. manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

1. Kinerja Pelayanan publik
 - a. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
 - b. inovasi pelayanan publik;
 - c. keterbukaan informasi publik;
 - d. standar pelayanan publik; dan
 - e. pelayanan pengaduan.
- Penyiapan bahan dan pengumpulan data dukung unsur Kepatuhan, meliputi:
 - a) Penyusunan Dokumen Probis
 - b) SiRUP
 - c) Laporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa semester I
 - d) SK Satgas SPIP
 - e) Dokumen Penilaian Resiko
 - f) Laporan Keuangan 2024 Audited
 - g) RKBMD
 - h) Berita Acara Penetapan Pemegang BMD
 - i) Dokumen pengeluaran barang berupa SPB dan SPPB
 - j) Dokumen Laporan Mutasi Barang
 - k) Bukti pemasangan label pada BMD
 - l) Identifikasi benturan Kepentingan
 - m) Kampanye anti gratifikasi
 - n) Dokumen DUK Bezetting dan daftar nominatif Pegawai
 - o) Dokumen Anjab ABK dan Peta Jabatan
- Penyiapan bahan dan pengumpulan data dukung unsur Pelayanan Publik, meliputi:
 - a) Penyusunan Kuesioner serta laporan SKM
 - b) Inovasi Pelayanan Publik
 - c) Keterbukaan Informasi Publik
 - d) Standar Pelayanan Publik
 - e) Pelayanan Pengaduan

- Melaksanakan rapat internal Kecamatan dalam rangka pembagian tugas dan penyiapan data dukung penilaian IKKI Kecamatan Sungai Tabuk.
- Melaksanakan penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah

5. Sasaran Kinerja Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas dengan indikator Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan. Kegiatan yang mendukung keberhasilan Sasaran Kinerja Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi:

- Persiapan Bahan dan Data, Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan :
 1. Penyusunan dokumen Renja Tahun 2026
 2. Penyusunan Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025
 3. Koordinasi dan penyusunan Perubahan dokumen DPA Tahun 2025
 4. Penyusunan Dokumen LKJIP tahun 2024
 5. Laporan RFK bulan Januari tahun 2025
 6. Laporan RFK bulan Februari tahun 2025
 7. Laporan RFK bulan Maret tahun 2025
 8. Laporan RFK bulan April tahun 2025
 9. Laporan RFK bulan Mei tahun 2025
 10. Laporan RFK bulan Juni tahun 2025
 11. Laporan RFK bulan Juli tahun 2025
 12. Laporan RFK bulan Agustus tahun 2025
 13. Laporan RFK bulan September tahun 2025
 14. Laporan RFK bulan Oktober tahun 2025
 15. Laporan RFK bulan November tahun 2025
 16. Laporan RFK bulan Desember tahun 2025
 17. Laporan kinerja triwulan I Tahun 2025
 18. Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025

19. Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025

20. Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025

6. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas dengan Indikator kinerja Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan. Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah antara lain:
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (243 orang/bulan)
 - Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (40 Dokumen)
 - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2024 (2 Dokumen)
7. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dengan Indikator kinerja Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah. Kegiatan yang mendukung keberhasilan Sasaran Kinerja Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebanyak 5 (lima) kegiatan yang telah terlaksana, yaitu:
- Persiapan Bahan dan Data dan pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD Triwulan I
 - Persiapan Bahan dan Data dan pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD Triwulan II
 - Persiapan Bahan dan Data dan pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD Triwulan III
 - Persiapan Bahan dan Data dan pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD Triwulan IV
 - Persiapan Bahan dan Data dan pelaksanaan RKBMD Tahun 2025

8. Sasaran Kinerja Lancarnya administrasi kepegawaian daerah dengan indikator kinerja Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu. Kegiatan yang mendukung keberhasilan kinerja ini antarlain:
- Penyelenggaraan Rapat internal membahas isu kepegawaian triwulan I
 - Penyelenggaraan Rapat internal membahas isu kepegawaian triwulan II
 - Penyelenggaraan Rapat internal membahas isu kepegawaian triwulan III
 - Penyelenggaraan Rapat internal membahas isu kepegawaian triwulan IV
 - Penyelenggaraan Bimbingan Teknis
9. Sasaran Kinerja Terselenggaranya kegiatan kantor dengan indikator Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Adminsitrasi Umum Perkantoran. Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja ini sebanyak 37 kegiatan yang telah terlaksana, antara lain:
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (4 Paket)
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (4 Paket)
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor (4 Paket)
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (4 Paket)
 - Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu (12 laporan)
 - Penyediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (12 laporan)
10. Sasaran Kinerja Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan dengan indikator kinerja Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan. Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja ini yaitu penyediaan Peralatan dan mesin berupa satu unit Mobil Dinas roda empat, Laptop, Printer dan Kursi dan meja rapat.

11. Sasaran Kinerja Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi. Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja ini sebanyak 37 kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain:
- penyediaan Jasa Surat Menyurat (12 laporan)
 - penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (12 laporan)
 - penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (12 laporan)
12. Sasaran Kinerja Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan dengan indikator kinerja Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara. Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja ini telah terlaksana sebanyak 28 kegiatan, yaitu:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (4 unit)
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (26 unit)
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (1 unit)
13. Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan pelayanan yang terlaksana. *Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.*
14. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan. Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran ini yaitu Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (kegiatan pelayanan publik), yaitu penyampaian laporan bulanan pelayanan administrasi Kecamatan.
15. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Kesejahteraan Sosial dengan indikator kinerja Jumlah Pelayanan Urusan Kesejahteraan Sosial yang Mudah diakses

16. Sasaran Kinerja Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Adapun Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja ini antara lain:

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Penyelenggaraan Kegiatan Kecamatan Sehat
- Penyelenggaraan Kegiatan Pendataan Sosial Masyarakat
- Penyelenggaraan Kegiatan Rembuk Stunting
- Penyelenggaraan Kegiatan PKH
- Penyelenggaraan Kegiatan DTKS

17. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana. Program yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja ini yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja ini antara lain; Berkoordinasi dengan Dinas PMD, Dinas Koperasi/UMKM, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, dan OPD terkait lainnya, Mengorganisir kegiatan musyawarah desa dan forum konsultasi publik untuk memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi, Menggerakkan tokoh masyarakat untuk terlibat dalam program pemberdayaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan, Mendorong pengembangan BUMDes dengan memberikan pendampingan administratif, pelaporan, dan manajemen usaha dan Melakukan monitoring rutin ke desa untuk memastikan program pemberdayaan berjalan efektif.

18. Sasaran Kinerja Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja ini antara lain:

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
 1. Kegiatan Pra Musrenbang terlaksana pada tanggal 21 Januari 2025
 2. Kegiatan Musrenbang terlaksana pada tanggal tanggal 6 Februari 2025
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 1. Kegiatan Rakor rutin PKK terlaksana setiap bulan
 2. Kegiatan Pembinaan Posyandu
 3. Kegiatan Evaluasi ADD dan DD
 4. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Kelompok Tani
 5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi APBDes

19.Sasaran Kinerja Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan indikator kinerja Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti. Program yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja ini yaitu Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, adapun Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja ini antara lain:

- Pelaksanaan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yaitu pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Ketenteraman dan Ketertiban Bagi Linmas Desa (1 laporan)
- Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yaitu pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (1 laporan)

20.Sasaran Kinerja Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang

Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (1 laporan) yaitu pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan tentang peran Linmas Desa dalam keamanan dan ketertiban Desa.

21. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (1 laporan) yaitu pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan tentang peran Linmas Desa dalam keamanan dan ketertiban Desa pada tanggal 20 Desember 2025

22. Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator kinerja Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana. Program yang mendukung keberhasilan kinerja ini yaitu Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, adapun Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja ini yaitu Peringatan HUT RI pada tanggal 17 Agustus 2025, target 200 orang, terlaksana 200 orang.

23. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan indicator Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Program yang mendukung kinerja ini adalah program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Kegiatan yang mendukung keberhasilan yaitu Penyelenggaraan Rakor Forkopimcam Tahun 2025.

24. Sasaran Kinerja Meningkatnya Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti dengan indicator Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti, program yang mendukung keberhasilan kinerja ini adalah Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Aktivitas yang mendukung kegiatan ini antara lain; Melayani pengaduan masyarakat, Koordinasi dengan Babinsa, Kapolsek dan Linmas terkait aduan masyarakat, dan mencatat pengaduan dalam buku register.

25. Sasaran Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa dengan indicator Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik, program yang mendukung keberhasilan kinerja ini adalah Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Aktivitas yang mendukung kegiatan ini antara lain; Koordinasi dengan Dinas PMD dan OPD terkait lainnya, Melakukan pendampingan desa dalam penyusunan rencana pembangunan dan Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa

26. Sasaran Kinerja Meningkatnya fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan dengan indikator kinerja Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan yang terlaksana. Program yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja ini yaitu Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, adapun Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja ini antara lain:

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

27. Sasaran Kinerja Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja ini antara lain:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - Kegiatan Pra Musrenbang Kelurahan Sungai Lulut
 - Kegiatan Musrenbang Kelurahan Sungai Lulut
 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - Pembuatan jembatan Jalan Karya Tani RT. 01 Kelurahan Sungai Lulut (DAU)
 - Pelatihan kader Masyarakat
 - Pelatihan Kegiatan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
 - Pelatihan Administrasi PKK
 3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 - Rapat PKK
 - Koordinasi RT
 - Kader Pembangunan Manusia (KPM)
 - Operasional Kelurahan Sungai Lulut
28. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti dengan indikator kinerja Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti. Aktivitas yang mendukung kegiatan ini antara lain; Menyusun SOP penanganan pengaduan masyarakat; menginformasikan mekanisme pengaduan di Kelurahan Sungai Lulut, serta memastikan pengaduan ditindaklanjuti sesuai mekanisme.

29. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan dengan indikator kinerja Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang Mudah diakses. Aktivitas yang mendukung kegiatan ini antara lain; Mengidentifikasi jenis layanan pemberdayaan (rekomendasi bantuan UMKM, fasilitasi pelatihan, pendataan kelompok masyarakat, surat keterangan usaha dan Menyediakan papan informasi, banner alur pelayanan, dan daftar persyaratan
30. Sasaran Kinerja Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan Tepat Waktu. Aktivitas yang mendukung kegiatan ini antara lain; Mengidentifikasi kebutuhan kantor Kelurahan Sungai Lulut, Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, data komponen, dokumentasi pembelian dan bukti pembayaran/belanja, Identifikasi kebutuhan jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan Listrik, Membayar tagihan layanan secara tepat waktu, Pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) honorarium dan iuran BPJS, Proses pembayaran honorarium dan iuran BPJS
31. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas dengan indikator kinerja Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan. Aktivitas yang mendukung kegiatan ini antara lain; Mengusulkan dan memastikan penetapan PPTK dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Kelurahan, Memeriksa kelengkapan SPP, SPM, dan dokumen pendukung, serta Mengarsipkan dokumen SPP, SPM, SPJ, dan bukti setor pajak, Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, daftar pegawai non-ASN yang menerima honorarium dan BPJS dan besaran honorarium dan iuran BPJS yang dibayarkan.

32. Sasaran Kinerja Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan dengan indikator kinerja Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan Aktivitas yang mendukung kegiatan ini antara lain; Identifikasi kebutuhan pengadaan mebel/peralatan/mesin, Pemesanan dan pembelian mebel/peralatan/mesin melalui penyedia terpilih serta Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, daftar mebel yang dibeli, informasi penyedia, dokumentasi pembelian dan bukti pembayaran/belanja pengadaan mebel/peralatan/mesin
33. Sasaran Kinerja Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan dengan indikator kinerja Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara Aktivitas yang mendukung kegiatan ini antara lain; Identifikasi sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Sungai Lulut serta pemeliharaan bangunan kantor
34. Sasaran Kinerja Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan indikator kinerja Jumlah Lembaga Per masyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum, Musyawarah perencanaan Pembangunan di Kelurahan Aktivitas yang mendukung kegiatan ini antara lain; Menyusun jadwal pelaksanaan Musrenbang Kelurahan, Pengumpulan data/usulan Musrenbang dari warga / lembaga kemasyarakatan, Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan, Dokumentasi/ pelaporan pelaksanaan Musrenbang Kelurahan.
35. Sasaran Kinerja Terbangunnya sarana dan Prasarana Kelurahan dengan indikator kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun. Aktivitas yang mendukung kegiatan ini antara lain; Mengidentifikasi kebutuhan warga melalui forum diskusi untuk menentukan prioritas sarana (jalan/drainase/taman/dll), Koordinasi dengan RT/RW, tokoh masyarakat serta instansi teknis, Monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan DAU serta melaporkan laporan hasil pekerjaan.

36. Sasaran Kinerja Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan indikator kinerja Jumlah Fokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kasi Pemberdayaan). Aktivitas yang mendukung kegiatan ini antara lain; Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan (Penyediaan upah jasa/insentif kader LPM, Linmas, RT/RW, Puskesmas), Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor dan Membuat laporan pelaksanaan kegiatan
37. Sasaran Kinerja Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan indikator kinerja Jumlah Fokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kasi Pemerintahan). Aktivitas yang mendukung kegiatan ini antara lain; Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan (Penyediaan upah jasa/insentif kader LPM, Linmas, RT/RW, Puskesmas), Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor dan Membuat laporan pelaksanaan kegiatan
38. Sasaran Kinerja Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan indikator kinerja Jumlah Fokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kasi Kesejahteraan Sosial). Aktivitas yang mendukung kegiatan ini antara lain; Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan (Penyediaan upah jasa/insentif kader LPM, Linmas, RT/RW, Puskesmas), Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor dan Membuat laporan pelaksanaan kegiatan

A.9 REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Banjar terhadap Laporan Kinerja Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2025 memperoleh nilai 74,84 atau predikat "BB". Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen yang di evaluasi. maka pada tahun 2025 direkomendasikan kepada Camat Sungai Tabuk hal-hal sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan Bappedaltbang untuk mencantumkan tujuan perangkat daerah pada pohon kinerja di aplikasi simondalev;
2. Menyusun pedoman pengukuran kinerja dan/atau SOP Pengukuran Kinerja sesuai dengan proses bisnis serta menginternalisasikannya dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kepada seluruh pegawai Menyusun pedoman pengumpulan data kinerja;
3. Melakukan pengukuran capaian kinerja berdasarkan rencana aksi yang telah ditetapkan;
4. Memastikan capaian kinerja diukur berdasarkan data yang handal serta melaporkannya ke dalam laporan kinerja dan aplikasi simondalev;
5. Melakukan evaluasi terhadap pengukuran kinerja sesuai dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja dan IKU;
6. Memanfaatkan hasil Pengukuran Kinerja sebagai dasar dalam pemberian Reward dan Punishment;
7. Melakukan penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien berdasarkan hasil pengukuran kinerja;
8. Meningkatkan komitmen Pimpinan dan seluruh pegawai untuk menginternalisasikan pengukuran kinerja secara aktif;
9. Melaporkan seluruh kinerja yang diperjanjikan ke dalam laporan kinerja secara berkala berdasarkan hasil pengukuran kinerja;
10. Memastikan laporan kinerja telah memuat analisis secara memadai untuk setiap jenjang kinerja;

11. Melakukan reviu berjenjang untuk memastikan laporan kinerja telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar dan mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja;
12. Melakukan evaluasi capaian kinerja pada laporan kinerja sesuai dengan sasaran, indikator dan target pada perjanjian kinerja;
13. Menyusun Laporan kinerja dengan menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja yang telah diperjanjikan secara selaras dengan Perjanjian kinerja dan sesuai dengan Definisi Operasional IKU pada seluruh sasaran kinerja dan menyajikan data secara konsisten dan valid pada semua informasi yang harus disajikan;
14. Mempublikasikan laporan kinerja secara tepat waktu;
15. Memanfaatkan Informasi dalam laporan kinerja berkala (triwulan) dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja pada periode berikutnya;
16. Menyusun Laporan kinerja dengan menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja yang telah diperjanjikan secara selaras dengan Perjanjian kinerja dan sesuai dengan Definisi Operasional IKU pada seluruh sasaran kinerja dan menyajikan data secara konsisten dan valid pada semua informasi yang harus disajikan;
17. Memanfaatkan Informasi dalam laporan kinerja berkala (triwulan) dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja pada periode berikutnya;
18. Memanfaatkan laporan kinerja tahunan untuk digunakan dalam penyesuaian perencanaan tahun berikutnya;
19. Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang melibatkan pemakilan seluruh unit kerja lingkup Kecamatan Sungai Tabuk;
20. Melakukan Evaluasi Internal yang dilakukan melalui secara mendalam untuk mendeteksi kelemahan dalam akuntabilitas kinerja seperti keselarasan antar indikator, penetapan indikator yang relevan dengan sasaran, kekurangan penyajian informasi dalam LKJIP, konsistensi dan validitas data serta pemanfaatan kinerja dalam pemberian penghargaan kepada pegawai.

Tindak lanjut

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat, Kecamatan Sungai Tabuk telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Tujuan Perangkat Daerah pada Aplikasi Simondalev telah di tambahkan dan telah berkoordinasi dengan Bappedalitbang
2. Akan melaksanakan pengukuran kinerja kepada seluruh pegawai dengan berpedoman SOP pengukuran kinerja sesuai dengan proses bisnis
3. Menindaklanjuti pengukuran kinerja berdasarkan Rencana Aksi
4. Telah melaporkan Laporan Kinerja dan Aplikasi Simondalev
5. Akan melakukan evaluasi pengukuran kinerja sesuai dengan DO dan formulasi perhitungan sesuai dengan IKU
6. melakukan pengukuran kinerja secara valid dan sesuai dalam hal pemberian reward dan funishment
7. Menetapkan jadwal monitoring (triwulan/bulanan) terhadap pencapaian kinerja dan memuat evaluasi yang melibatkan seluruh pegawai untuk membahas capaian dan kendala
8. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja terhadap rencana aksi dan target pada perjanjian kinerja yang telah dibuat dan dijadikan bahan rencana tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan kinerja pada triwulan berikutnya dimuat dalam laporan kinerja triwulan
9. Akan memastikan Laporan Kinerja memuat analisis pada setiap jenjang kiinerja di lingkup Kecamatan Sungai Tabuk
10. Melakukan reuiu berjenjang dalam menyajikan Laporan Kinerja
11. Melakukan evaluasi capaian kinerja per triwulannya sesuai dengan target pada PK Perubahan 2025
12. Perjanjian Kinerja (PK) sampai dengan individu/staf yang sudah di buat.
13. Mempublikasikan LHE dan TLHE di ESR MenPAN RB
14. Memperbaiki SK IKU yang memuat Definisi Operasional
15. Mengevaluasi AKIP dan melibatkan seluruh unit kerja lingkup Kecamatan Sungai Tabuk

16. Melakukan evaluasi internal terhadap keselarasan antar indikator, penetapan indikator yang relevan dengan sasaran, konsistensi dan validasi data serta pemanfaatan kinerja dalam pemberian penghargaan kepada pegawai.

B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan anggaran yang dikelola Kecamatan Sungai Tabuk tahun 2025 adalah sebesar **Rp 5.256.985.833,-** dengan realisasi anggaran **Rp. 4.864.929.536,-** atau **(92,54 %)** dengan rincian untuk Belanja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp. 2.668.150.000,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 2.526.772.507,- atau (94,70 %), Belanja Barang dan Jasa dengan anggaran Rp 1.886.937.833,- dan Realisasi sebesar Rp. 1.666.056.021,- atau (88,29 %) serta Belanja Modal dengan anggaran sebesar Rp. 701.898.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 672.101.008,- atau (95,75 %).

Tabel 3.7 Realiasi Jenis Belanja

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1.	Belanja Operasi	4,555,087,833	4,192,828,528	92.05
	a. Belanja Pegawai	2,668,150,000	2,526,772,507	94.70
	b. Belanja Barang dan Jasa	1,886,937,833	1,666,056,021	88.29
	c. Belanja Hibah	-	-	N/A
2	Belanja Modal	701,898,000	672,101,008	95.75
	TOTAL	5,256,985,833	4,864,929,536	92.54

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2025

Adapun untuk realisasi anggaran berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8 Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase capaian
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	5,256,985,833	4,864,929,536	92.54
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,799,096,333	3,549,158,382	93.42
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31,670,000	22,509,000	71.07
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16,470,000	13,159,000	79.90
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,200,000	9,350,000	61.51
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,716,346,000	2,571,032,507	94.65
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,659,400,000	2,518,572,507	94.70
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52,460,000	52,460,000	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,486,000	-	0.00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9,750,000	9,200,000	94.36
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,000,000	1,000,000	100.00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8,750,000	8,200,000	93.71
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27,400,000	26,520,000	96.79
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3,400,000	2,520,000	74.12
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24,000,000	24,000,000	100.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	167,190,000	163,276,536	97.66
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,790,000	5,717,500	98.75
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,740,000	3,740,000	100.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27,500,000	27,348,300	99.45
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,000,000	2,500,000	50.00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	8,160,000	7,269,000	89.08
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117,000,000	116,701,736	99.75

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase capaian
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	457,009,000	433,092,008	94.77
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	342,000,000	323,400,000	94.56
Pengadaan Mebel	24,816,000	21,967,009	88.52
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90,193,000	87,724,999	97.26
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	248,389,203	192,481,883	77.49
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000	4,000,000	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54,559,203	26,553,383	48.67
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189,830,000	161,928,500	85.30
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141,342,130	131,046,448	92.72
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96,840,000	96,738,448	99.90
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17,060,000	6,875,000	40.30
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27,442,130	27,433,000	99.97
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	51,010,000	43,712,250	85.69
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	42,370,000	42,092,250	99.34
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	42,370,000	42,092,250	99.34
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8,640,000	1,620,000	18.75
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8,640,000	1,620,000	18.75
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1,094,783,000	970,456,904	88.64
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	124,680,000	104,760,000	84.02
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20,400,000	20,292,000	99.47
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	104,280,000	84,468,000	81.00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	970,103,000	865,696,904	89.24

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase capaian
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Lulut	970,103,000	865,696,904	89.24
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14,975,000	13,383,000	89.37
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9,315,000	8,090,000	100.00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5,885,000	4,730,000	80.37
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3,430,000	3,360,000	97.96
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5,660,000	5,293,000	93.52
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5,660,000	5,293,000	93.52
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	265,255,500	257,539,000	97.09
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	265,255,500	257,539,000	97.09
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	87,332,500	84,344,000	96.58
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	137,123,000	133,695,000	97.50
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	40,800,000	39,500,000	96.81
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	31,866,000	30,680,000	96.28
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31,866,000	30,680,000	96.28
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4,080,000	3,920,000	96.08
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4,080,000	3,990,000	97.79
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	19,626,000	18,870,000	96.15
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4,080,000	3,900,000	95.59

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Aplikasi SIPD Langkar Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2025

Penjelasan Tabel 3.8 sebagai berikut :

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Tahun 2025 dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 93.34 Nilai dapat terealisasi 93.97 Nilai dengan nilai capaian 100.67 %, Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Kecamatan Tahun 2025 dengan Indikator Nilai Evaluasi Kecamatan dengan target 93.00 Nilai dapat terealisasi 98.75 Nilai dengan nilai capaian 106.18 %, Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target 74.00 Nilai dapat terealisasi 74.84 Nilai dengan nilai capaian 101.14 %, yang didukung dengan target anggaran sebesar Rp 5.256.985.833,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.864.929.536,- atau (92.54 %) dengan realisasi fisik sebesar 99,88 %.

Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan diukur dengan indikator Indeks kepatuhan dan Kinerja Intern sebesar 80,00%. Adapun realisasi program ini adalah dengan tercapainya Indeks kepatuhan dan Kinerja Intern sebesar 91.25% dengan pagu sebesar Rp. 3.799.096.333,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.549.158.382,-.atau (93.42%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1). Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indicator Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD. Adapun target kegiatan ini adalah 100 % dengan realisasi tersusunnya jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD sebesar 100 %. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 31.670.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 22.509.000,- atau (71,07 %) dan realisasi fisik sebesar 100 %, Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah diukur dengan indicator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan target kinerja berupa 13 Dokumen. Adapun realisasi kegiatan yaitu tersusunnya Dokumen RENSTRA Perubahan Kedua, Rencana Aksi, Tabel Keselarasan, Rencana Aksi Perubahan, Tabek Keselarasan Perubahan, RKA Murni, RKA Perubahan, DPA Murni, DPA Perubahan, LKJIP, PK Murni, PK Perubahan, IKU. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 16.470.000,- dengan realisasi Rp. 13.159.000,- atau (79,90 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.
- b. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indicator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan target kinerja berupa 21 Laporan. Adapun realisasi kegiatan yaitu tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan, Laporan RFK, Laporan RENJA, e-monev SAKIP Triwulan. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 15.200.000,- dengan realisasi Rp. 9.350.000,- atau (61,51 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.

2). Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah diukur dengan indicator Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Adapun target kegiatan ini adalah 100 % dengan realisasi Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan sebesar 100 %. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 2.716.346.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.571.032.507,- atau (94,65 %) dan realisasi fisik sebesar 100 %, Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan diukur dengan indicator Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 273 Orang/bulan. Adapun realisasi kegiatan yaitu Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN sebanyak 273 Orang selama 1 tahun. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.659.400.000,- dengan realisasi Rp. 2.518.572.507,- atau (94,70 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.

- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD diukur dengan indicator Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebanyak 4 dokumen. Adapun realisasi kegiatan yaitu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebanyak 4 dokumen penatausahaan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 52.460.000,- dengan realisasi Rp. 52.460.000,- atau (100 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD diukur dengan indicator Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 Laporan. Adapun realisasi kegiatan yaitu tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun/ Laporan CaLK Tahun 2025 sebanyak 1 Laporan Keuangan SKPD. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 4.486.000,- dengan realisasi Rp. 0,- atau (0 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.

3). Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat

Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah diukur dengan indicator Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Adapun target kegiatan ini adalah 100 % dengan realisasi Jumlah Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan sebesar 100 %. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 9.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.200.000,- atau (94,36 %) dan realisasi fisik sebesar 100 %, Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD diukur dengan indicator Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 1 Laporan. Adapun realisasi kegiatan yaitu Terlaksananya rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah sebanyak 1 Laporan. Pagu sub kegiatan ini

sebesar Rp. 100.000,- dengan realisasi Rp. 1.000.000,- atau (100 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.

- b. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD diukur dengan indicator Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 1 Laporan/ Honorarium Bendahara Barang dan Pembantu Barang. Adapun realisasi kegiatan yaitu Terlaksananya penatausahaan BMD sebanyak 1 Laporan. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 8.750.000,- dengan realisasi Rp. 8.200.000,- atau (93,71 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.

4). Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah diukur dengan indicator Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi. Adapun target kegiatan ini adalah 100 % dengan jumlah Administrasi Kepegawaian di Kecamatan sebesar 100 %. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 27.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.520.000,- atau (96,79 %) dan realisasi fisik sebesar 100 %, Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai diukur dengan indicator Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai sebanyak 1 Laporan. Adapun realisasi kegiatan yaitu tersedianya laporan moitoring, evaluasi dan kinerja pegawai (SKP) sebanyak 1 Laporan. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.400.000,- dengan realisasi Rp. 2.520.000,- atau (74,12 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.
- b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan diukur dengan indicator Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 3. Ada orang. Adapun realisasi kegiatan yaitu Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 3 orang yang mengikuti bimtek. Pagu sub kegiatan ini sebesar

Rp. 24.000.000,- dengan realisasi Rp. 24.000.000,- atau (100 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.

5). Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah diukur dengan indikator Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi. Adapun target kegiatan ini adalah 100 % dengan Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah di Kecamatan yang dilaksanakan sebesar 100 %. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 167.190.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 163.276.536,- atau (97,66 %) dan realisasi fisik sebesar 100 %, Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor diukur dengan indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 4 paket. Adapun realisasi kegiatan yaitu tersedianya komponen Listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 4 paket. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.790.000,- dengan realisasi Rp. 5.717.500,- atau (98,75 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga diukur dengan indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 4 paket. Adapun realisasi kegiatan yaitu tersedianya peralatan rumah tangga seperti sendok, piring dan gelas untuk kegiatan Safari Ramadhan, pergantian tirai/ horden kantor sebanyak 4 paket. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.740.000,- dengan realisasi Rp. 3.740.000,- atau (100,00 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor diukur dengan indicator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan sebanyak 4 paket. Adapun realisasi kegiatan yaitu jumlah bahan logistic yang tersedia di kecamatan sebanyak 4 paket. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 27.500.000,- dengan realisasi Rp. 27.348.300,- atau (99,45 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan diukur dengan indicator Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 1 paket. Adapun realisasi kegiatan yaitu Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang tersedia di kecamatan sebanyak 1 paket. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.000.000,- dengan realisasi Rp. 2.500.000,- atau (50 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.
- e. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu diukur dengan indicator Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu sebanyak 1 laporan. Adapun realisasi kegiatan yaitu Jumlah tamu yang terfasilitasi di kecamatan sebanyak 1 laporan. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 8.160.000,- dengan realisasi Rp. 7.269.000,- atau (89,08 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.
- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD diukur dengan indicator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan. Adapun realisasi kegiatan yaitu Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terlaksana sebanyak 12 laporan. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 117.000.000,- dengan realisasi Rp. 116.701.736,- atau (99,75 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.

6). Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah diukur dengan indicator Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan daerah. Adapun target kegiatan ini adalah 100 % dengan Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan daerah yang terlaksana sebesar 100 %. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 457.009.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 433.092.008,- atau (94,77 %) dan realisasi fisik sebesar 100 %, Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan diukur dengan indicator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan sebanyak 1 unit. Adapun realisasi kegiatan yaitu tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak 1 unit. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 342.000.000,- dengan realisasi Rp. 323.400.000,- atau (94,56 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.
- b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel diukur dengan indicator Jumlah Paket mebel yang Disediakan sebanyak 2 unit. Adapun realisasi kegiatan yaitu tersedianya mebel sebanyak 2 unit. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 24.816.000,- dengan realisasi Rp. 21.967.009,- atau (88,52 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.
- c. Sub Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya diukur dengan indicator Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang Disediakan sebanyak 287 unit. Adapun realisasi kegiatan yaitu tersedianya PC, Laptop, Printer, Kamera, Kursi plastik Nappolly, Sound System, Microphone. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 90.193.000,- dengan realisasi Rp. 87.724.999,- atau (97,26 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.

7). Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diukur dengan indicator Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Adapun target kegiatan ini adalah 100 % dengan Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sebesar 100 %. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 248.389.203,- dengan realisasi sebesar Rp. 192.481.883,- atau (77,49 %) dan realisasi fisik sebesar 100 %, Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat diukur dengan indicator Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 4 laporan. Adapun realisasi kegiatan yaitu terlaksananya kegiatan surat menyurat di kecamatan sebanyak 4 laporan. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 4.000.000,- dengan realisasi Rp. 4.000.000,- atau (100 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik diukur dengan indicator Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang tersedia sebanyak 12 laporan. Adapun realisasi kegiatan yaitu terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik sebanyak 12 laporan. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 54.559.203,- dengan realisasi Rp. 26.553.383,- atau (48,67 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %. Tidak banyak terserap karena sesuai dengan kebutuhan rutin pengeluaran bulanan di kecamatan
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor diukur dengan indicator Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan sebanyak 12 laporan. Adapun realisasi kegiatan yaitu terealisasinya pembayaran upah PTT dan Iuran jaminan Kesehatan dan jaminan kecelakaan sebanyak 12 laporan. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 189.830.000,- dengan realisasi Rp. 161.928.500,- atau (85,30 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.

8). Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diukur dengan indikator Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah. Adapun target kegiatan ini adalah 100 % dengan jumlah pemeliharaan BMD penunjang urusan perangkat daerah yang terpelihara sebesar 100 %. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 141.342.130,- dengan realisasi sebesar Rp. 131.046.448,- atau (92,72 %) dan realisasi fisik sebesar 100 %, Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan diukur dengan indikator Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya sebanyak 4 unit. Adapun realisasi kegiatan yaitu terpeliharanya mobil dinas operasional Camat dan kendaraan roda 2 di kecamatan sebanyak 4 unit. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 96.840.000,- dengan realisasi Rp. 96.738.448,- atau (99,90 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya diukur dengan indikator Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sebanyak 18 unit. Adapun realisasi kegiatan yaitu terpeliharanya peralatan dan mesin seperti AC, PC, Laptop, printer yang di service sebanyak 18 unit. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 17.060.000,- dengan realisasi Rp. 6.875.000,- atau (40,30 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya diukur dengan indikator Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 1 unit. Adapun realisasi kegiatan yaitu terpeliharanya bangunan Gedung kantor kecamatan seperti perbaikan atap dan pergantian keramik sebanyak 1 unit. Pagu

sub kegiatan ini sebesar Rp. 27.442.130,- dengan realisasi Rp. 27.433.000,- atau (99,97 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Capaian kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik diukur dengan indikator Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana sebesar 100%. Adapun realisasi program ini adalah dengan tercapainya Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana sebesar 100% dengan pagu sebesar Rp. 51.010.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 43.712.250,-.atau (99,97%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1). Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Capaian kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan diukur dengan indicator Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Adapun target kegiatan ini adalah 100 % dengan realisasi Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang dilaksanakan sebesar 100 %. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 42.370.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 42.092.250,- atau (99,34 %) dan realisasi fisik sebesar 80.00 %, Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan diukur dengan indicator Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan berupa 5 laporan. Adapun realisasi kegiatan yaitu terlaksananya Rakor Pra rembuk stunting, Rakor rembuk stunting, Rakor Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Rapat Koordinasi Puskessos. Sedangkan untuk kegiatan Rapat Koordinasi PKH tidak dapat direalisasikan karena waktu verifikasi data yang tidak mencukupi untuk diadakan kegiatan tersebut. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 42.370.000,- dengan realisasi Rp. 42.092.250,- atau (99,34 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 80.00 %.

2). Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Capaian kinerja Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat diukur dengan indicator Jumlah Sub Keg Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang terlaksana. Adapun target kegiatan ini adalah 100 % dengan realisasi Jumlah Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang terlaksana sebesar 100 %. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 8.640.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.620.000,- atau (18,75 %) dan realisasi fisik sebesar 100 %, Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan diukur dengan indicator Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan berupa 1 laporan. Adapun realisasi kegiatan yaitu terlaksananya Rapat TKPK. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 8.640.000,- dengan realisasi Rp. 1.620.000,- atau (18,75 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Capaian kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan diukur dengan indikator Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan sebesar 100%. Adapun realisasi program ini adalah dengan tercapainya Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan sebesar 100% dengan pagu sebesar Rp. 124.680.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 104.760.000,-.atau (84,02%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1). Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Capaian kinerja Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa diukur dengan indicator Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan. Adapun target kegiatan ini adalah 100 % dengan realisasi jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang di laksanakan (Kegiatan PKK, Musrenbang Kecamatan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Lainnya sebesar 100 %. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 124.680.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 104.760.000,- atau (84,02 %) dan realisasi fisik sebesar 90.00 %, Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa diukur dengan indicator Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa sebanyak 21 Lembaga Kemasyarakatan. Adapun realisasi kegiatan yaitu terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan pada Bulan Januari 2025. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 20.400.000,- dengan realisasi Rp. 20.292.000,- atau (99,47 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.

- b. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan diukur dengan indicator Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebanyak 3 laporan. Adapun realisasi kegiatan yaitu terlaksananya Evaluasi Anggaran Dana Desa, Monitoring Dokumen Keuangan Desa, Kegiatan PKK, Pembinaan Pengelolaan ADD, Rapat Evaluasi APBDES dan Sosialisasi BUMDES. Yang tidak terealisasi yaitu Jamuan Tamu pada kegiatan PKK. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 104.280.000,- dengan realisasi Rp. 84.468.000,- atau (81,00 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 90,00 %.

2). Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Capaian kinerja Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan diukur dengan indicator Presentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Adapun target kegiatan ini adalah 100 % dengan realisasi Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebesar 100 %. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 970.103.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 865.396.904,- atau (89,21 %) dan realisasi fisik sebesar 100 %, Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan Pagu Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 2.955.800,- dengan Realisasi Rp. 2.839.000
- b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan Pagu Sub Kegiatan Rp. 200.000.000 dengan Realisasi Rp. 200.000.000
- c. Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Lulut diukur dengan indicator Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebanyak 1 Pokmas. Adapun realisasi kegiatan yaitu terlaksananya Pelatihan Administrasi PKK, Pelatihan Kegiatan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), terlaksananya Sosialisasi Stunting, Pelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat

dalam menghadapi Bencana, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan Belanja Modal Jalan Lainnya berupa Jalan Pemukiman di jalan Karya Tani RT. 1 Kelurahan Sungai Lulut serta untuk Operasional Kelurahan Sungai Lulut Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 767.147.200,- dengan realisasi Rp. 662.557.904,- atau (86,37 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.

IV. PROGRAM PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Capaian kinerja Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum diukur dengan indikator Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan sebesar 100%. Adapun realisasi program ini adalah dengan tercapainya Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan sebesar 100% dengan pagu sebesar Rp. 14.975.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.383.000,-.atau (89,37%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1). Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Capaian kinerja Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum diukur dengan indicator Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan. Adapun target kegiatan ini adalah 100 % dengan realisasi Terlaksananya Kegiatan Trantibumlinmas di Kecamatan sebesar 100 %. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 9.315.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.090.000,- atau (89,37 %) dan realisasi fisik sebesar 100 %, Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan diukur dengan indicator Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertical di wilayah kecamatan sebanyak 1 laporan. Adapun realisasi kegiatan yaitu terlaksananya Fasilitasi Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banjar berupa Apel Gabungan dan Pengamanan pelaksanaan. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.885.000,- dengan realisasi Rp. 4.730.000,- atau (80,37 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.
- b. Sub kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat diukur dengan indicator Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat sebanyak 1 laporan. Adapun realisasi kegiatan yaitu terlaksananya Rapat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di wilayah Kecamatan Sungai Tabuk . Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.430.000,- dengan realisasi Rp. 3.360.000,- atau (97,96 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.

2). Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Adapun target kegiatan ini adalah 100 % dengan realisasi Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi sebesar 100 %. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 5,660.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.293.000,- atau (93,52 %) dan realisasi fisik sebesar 100 %, Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia diukur dengan indikator Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebanyak 1 laporan. Adapun realisasi kegiatan yaitu terlaksananya Rapat Penegakan Perda dan Perkada. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.660.000,- dengan realisasi Rp. 5.293.000,- atau (93,52 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Capaian kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Umum diukur dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 100%. Adapun realisasi program ini adalah dengan Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan sebesar 100% dengan pagu sebesar Rp. 265.255.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 257.539.000,-.atau (97,09%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1). Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah diukur dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi. Adapun target kegiatan ini adalah 100 % dengan realisasi Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan sebesar 100 %. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 265.255.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 257.539.000,- atau (97,09 %) dan realisasi fisik sebesar 100 %, Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia diukur dengan indicator Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebanyak 200 orang. Adapun realisasi kegiatan yaitu terlaksananya Rapat persiapan kegiatan Peringatan HUT RI, Peringatan HUT RI pada Bulan Agustus 2025. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 87.332.500,- dengan realisasi Rp. 84.344.000,- atau (96,58 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.

- b. Sub kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal diukur dengan indicator Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal sebanyak 3 dokumen. Adapun realisasi kegiatan yaitu terlaksananya kegiatan MTQ pada bulan Juli 2025 dan Kegiatan PHBI. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 137.123.000,- dengan realisasi Rp. 133.695.000,- atau (97,50 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.
- c. Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan diukur dengan indicator Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebanyak 1 dokumen. Adapun realisasi kegiatan yaitu terlaksananya Pertemuan FORKOPIMCAM sebanyak 3 kali dan Honorarium Tim Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan. Pertemuan Forkopimcam tidak terlaksana karena susah mencari jadwal agenda yang saling berbenturan dengan kegiatan lain dengan pertemuan Tim Forkopimcam. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp.

40.800.000,- dengan realisasi Rp. 39.500.000,- atau (96,81 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.

VI. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN

DESA

Capaian kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa diukur dengan indikator Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebesar 100%. Adapun realisasi program ini adalah dengan Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebesar 100% dengan pagu sebesar Rp. 31.866.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 30.680.000,-.atau (96,28%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1). Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian kinerja Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa diukur dengan indicator Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Adapun target kegiatan ini adalah 100 % dengan realisasi Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan sebesar 100 %. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 31.866.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 30.680.000,- atau (96,28 %) dan realisasi fisik sebesar 100 %, Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa sebanyak 1 dokumen. Adapun realisasi kegiatan yaitu terlaksananya Rapat Pembinaan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 4.080.000,- dengan realisasi Rp. 3.920.000,- atau (96,08 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.

- b. Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa sebanyak 1 dokumen. Adapun realisasi kegiatan yaitu terlaksananya Rapat Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 4.080.000,- dengan realisasi Rp. 3.990.000,- atau (97,79 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.
- c. Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak 12 dokumen. Adapun realisasi kegiatan yaitu terlaksananya Rapat Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 19.626.000,- dengan realisasi Rp. 18.870.000,- atau (96,15 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.
- d. Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 1 dokumen. Adapun realisasi kegiatan yaitu terlaksananya Rapat Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 4.080.000,- dengan realisasi Rp. 3.900.000,- atau (95,59 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran untuk mewujudkan Sasaran Kinerja Organisasi

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.34	93.97	100.67	5,256,985,833	4,864,929,536	92.54
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	93.00	98.75	106.18			
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74.00	74.84	101.14			
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Tabuk	100	100	100	3,799,096,333	3,549,158,382	93.42
5	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	100	100	100	31,670,000	22,509,000	71.07
6	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100	100	100	2,716,346,000	2,571,032,507	94.65
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	100	100	100	9,750,000	9,200,000	94.36
8	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	100	100	100	27,400,000	26,520,000	96.79
9	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terasiliasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	100	100	100	167,190,000	163,276,536	97.66

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100	100	100	457,009,000	433,092,008	94.77
11	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100	100	100	248,389,203	192,481,883	77.49
12	Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100	100	100	141,342,130	131,046,448	92.72
13	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana	100	100	100	42,370,000	42,092,250	99.34
14	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan.	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Kecamatan	100	100	100			
15	Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pelayanan Urusan Kesejahteraan Sosial yang Mudah diakses	100	100	100			
16	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100	100	8,640,000	1,620,000	18.75
17	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100	100	100	124,680,000	104,760,000	84.02
18	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa masyarakat	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100			

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100	100	100	970,103,000	865,696,904	89.24
20	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	100	100	100			
21	Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang Mudah diakses	100	100	100			
22	Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100	100	100	14,975,000	13,383,000	89.37
23	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	9,315,000	8,090,000	86.85
24	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	100	100	5,660,000	5,293,000	93.52
25	Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	100	100	100	265,255,500	257,539,000	97.09
26	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100	100			
27	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	100	100	100			

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	100	100	100	31,866,000	30,680,000	96.28
29	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100			

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2025, merupakan bentuk pengawasan dan pertanggung jawaban pencapaian kinerja Tahun 2025, yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan LKJIP ini berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2025 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan Kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2025, sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan Indikator kinerja sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 93.97 Nilai dengan target 93.34 Nilai dengan capaian 100.67 % di bandingkan dengan realisasi tahun 2024 kinerja sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) realisasi sebesar 92.24 dengan target 92.24 dengan capaian 100.00 % maka pada tahun 2025 ini terdapat kenaikan nilai capaian kinerja dan nilai capaian memenuhi target capaian tahun 2025.

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Kecamatan dengan Indikator kinerja kinerja sasaran Nilai Evaluasi Kecamatan realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 98,75 Nilai dengan target 93.00 Nilai dengan capaian 106.18 % di bandingkan dengan realisasi tahun 2024 kinerja sasaran Evaluasi Kinerja Kecamatan realisasi sebesar 92.29 dengan target 76.00 dengan capaian 121,43 % maka pada tahun 2025 ini terdapat kenaikan nilai capaian kinerja dan nilai capaian memenuhi target capaian tahun 2025.

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator kinerja kinerja sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 74.84 Nilai dengan

target 74.00 Nilai dengan capaian 101.14 % di bandingkan dengan realisasi tahun 2024 kinerja sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah realisasi sebesar 71.16 nilai maka pada tahun 2025 ini terdapat kenaikan nilai capaian kinerja dan nilai capaian memenuhi target capaian tahun 2025. Pencapaian keberhasilan sasaran strategis ini di dukung indikator kinerja lain sebagai berikut :

1. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
2. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Kecamatan
3. Sasaran Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
4. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah
5. Sasaran Kinerja Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas
6. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas
7. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
8. Sasaran Kinerja Lancarnya administrasi kepegawaian daerah
9. Sasaran Kinerja Terselenggaranya kegiatan kantor
10. Sasaran Kinerja Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan
11. Sasaran Kinerja Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12. Sasaran Kinerja Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan
13. Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan
14. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

15. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Kesejahteraan Sosial
16. Sasaran Kinerja Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
17. Sasaran Kinerja Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
18. Sasaran Kinerja Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa masyarakat
19. Sasaran Kinerja Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
20. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
21. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
22. Sasaran Kinerja Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
23. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
24. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti
25. Sasaran Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa
26. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
27. Sasaran Kinerja Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
28. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti
29. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan
30. Sasaran Kinerja Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

31. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas
32. Sasaran Kinerja Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan
33. Sasaran Kinerja Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan
34. Sasaran Kinerja Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Kelurahan
35. Sasaran Kinerja Terbangunnya sarana dan Prasarana Kelurahan
36. Sasaran Kinerja Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
37. Sasaran Kinerja Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
38. Sasaran Kinerja Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Tercapainya target kinerja untuk masing- masing indikator kinerja yang termuat Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 menjadi salah satu faktor pendorong tercapainya target indikator sasaran strategis Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2025.

Saran-saran

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Pembahasan di tingkat yang lebih tinggi tentang program dan kegiatan yang selama ini dilaksanakan di Kecamatan Sungai Tabuk agar sinkron antara perencanaan dan keuangan agar adanya kejelasan dalam capaian kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
2. Perlunya peningkatan wawasan dan pendampingan yang rutin oleh instansi /mitra pemangku terhadap aparatur kecamatan khususnya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pendampingan penyusunan Perjanjian Kinerja, Pohon Kinerja, Tabel Keselaran guna peningkatan nilai SAKIP.

3. Pelaksanaan Koordinasi yang lebih intens lagi baik itu pada internal kecamatan Sungai Tabuk maupun dengan pihak diluar Kecamatan Sungai Tabuk

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sungai Tabuk ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Sungai Tabuk berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2025 dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam Pencapaian target- target perencanaan pada tahun berikutnya.



Sungai Tabuk, Februari 2026
Plt. Camat Sungai Tabuk,

Ranuwaty Rosayulinda, SP. MP
NIP. 19680701 199703 2 003

LAMPIRAN

1. Pohon Kinerja dan Cascading

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1khztXLyXTY-zr6QPMJGmmxNaB7XY2lpG/edit?usp=drive_link&oid=107548561078071724258&rtpof=true&sd=true

2. Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2025

https://docs.google.com/document/d/1OOTSpoIlxgozsmB2Cvmk9WdmEQp9Evi5/edit?usp=drive_link&oid=107548561078071724258&rtpof=true&sd=true

